

**PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK  
DUGAAN KASUS KECURANGAN KPU DALAM TAGAR  
TWITTER #AUDITKPU PADA PEMILU 2024**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Ilmu Sosial (S. Sos) dalam Bidang Ilmu Politik**



**Oleh:  
APRILIA WINDAH SRI LESTARI  
NIM. I91219071**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
JULI 2023**

**PERNYATAAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahirrohmaanirrohiim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Aprilia Windah Sri Lestari  
NIM : I91219071  
Program Studi : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Pembentukan Opini Publik: Dugaan Kasus  
Kecurangan KPU dalam Tagar Twitter #AuditKPU  
pada Pemilu 2024

Menyatakan dengan bersungguh-sungguh bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah diajukan kepada lembaga pendidikan tinggi mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini merupakan benar-benar hasil karya mandiri penulis dan bukan merupakan jiplakan atau plagiasi atas karya orang lain.
3. Penulis bersedia menanggung semua konsekuensi hukum bila ternyata di kemudian hari diketahui atau terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiasi.

Surabaya, 18 Juni 2023

Yang menyatakan,

A 5000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '5000', and 'METERAL TEMPEL'. Below the stamp, the name 'Aprilia Windah Sri Lestari' is printed.

NIM: I91219071

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aprilia Windah Sri Lestari

Nim : 191219071

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul: **"Pembentukan Opini Publik Dugaan Kasus Kecurangan KPU dalam Tagar Twitter #AuditKPU pada Pemilu 2024"**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Politik dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 14 Juni 2023

Pembimbing



Ajeng Widya Prakasita, M.A.

NIP. 199502232020122025

**PENGESAHAN****PENGESAHAN**

Skripsi oleh Aprilia Windah Sri Lestari dengan judul: "Pembentukan Opini Publik Dugaan Kasus Kecurangan KPU dalam Tagar Twitter #AuditKPU pada Pemilu 2024" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus didepan depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 05 Juli 2023.

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

Penguji I

Ajeng Widya Prakasita, M.A.

NIP. 199502232020122025

Penguji II

Holilah S. Ag., M.Si

NIP. 197610182008012008

Penguji III

Moh Ilyas Rolis, M.Si

NIP. 197704182011011007

Penguji IV

Muh. Yusrol Fahmi, M.IP

NIP. 202111007

Surabaya, 05 Juli 2023

Mengesahkan,  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Dekan

H. Abd. Chalik, M.Ag.

NIP. 197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aprilia Windah Sri Lestari  
NIM : I91219071  
Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Politik  
E-mail address : [apriawindah27@gmail.com](mailto:apriawindah27@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain ( ..... )  
yang berjudul :

Pembentukan Opini Publik Dugaan Kasus Kecurangan KPU dalam Tagar Twitter  
#AUDITKPU pada Pemilu 2024

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Agustus 2023

Penulis

( Aprilia Windah Sri Lestari )

*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

**Aprilia Windah Sri Lestari, 2023, Pembentukan Opini Publik Dugaan Kasus Kecurangan KPU dalam Tagar Twitter #AuditKPU pada Pemilu 2024, “Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya”.**

**Kata Kunci:** Pembentukan Opini Publik, Twitter, *Social Network Analysis*.

Penelitian ini membahas tentang pembentukan opini publik yang muncul terkait dugaan kasus kecurangan KPU dalam tagar Twitter #AuditKPU pada pemilu 2024. Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi di era globalisasi saat ini menyebabkan opini publik kian diberikan kedudukan dan akses yang seluas-luasnya dalam berpartisipasi pada dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan terbentuknya opini publik di media sosial Twitter khususnya pada kasus dugaan kasus kecurangan KPU dalam tagar Twitter #AuditKPU pada pemilu 2024.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Social Network Analysis* (SNA) menggunakan bantuan software *Netlytic* untuk membantu memperoleh data media sosial Twitter dalam tagar #AuditKPU. Teori yang digunakan dalam penelitian yakni teori pembentukan opini publik Bernard Hennessy.

Hasil penelitian berdasarkan analisis data yang telah peneliti lakukan menemukan bahwa, Twitter mampu berperan dalam pembentukan opini publik berdasarkan pada hasil dari SNA, bahwa opini masyarakat dalam tagar #AuditKPU merupakan aktivisme digital yang terjadi secara organik dan tidak dikendalikan oleh aktor maupun organisasi tertentu. Pembentukan opini publik pada tagar Twitter #AuditKPU juga terjadi karena telah memenuhi faktor-faktor pembentukan opini publik seperti yang disampaikan oleh Bernard Hennessy diantaranya yakni (1) adanya isu (*presence of an issue*), dimana isu yang terdapat dalam penelitian ini ialah adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh KPU saat verifikasi data partai politik calon peserta pemilu 2024 yang disuarakan oleh partai politik Prima. (2) adanya kelompok yang berkepentingan (*nature of publics*), sesuai dengan observasi dan data yang diperoleh peneliti, maka yang dimaksud sebagai kelompok yang berkepentingan ialah partai politik Prima. (3) adanya pilihan yang sulit (*complex of preferences*), pilihan ini berupa permintaan penundaan pemilu 2024 atau dihentikannya proses pemilu 2024 hingga pada KPU yang harus diaudit. (4) adanya suatu pernyataan/opini (*expression of opinion*), masyarakat menyampaikan opini atau pendapatnya terkait dugaan kasus kecurangan KPU pada tagar #AuditKPU melalui berbagai cara penyampaian, dapat berupa gambar, tulisan, saran, kritik, dan lain sebagainya. Dan (5) yang terakhir jumlah orang yang terlibat (*number of persons involved*).

## ABSTRACT

**Aprilia Windah Sri Lestari, 2023, Public Opinion Formation of Alleged KPU Fraud Cases in Twitter Hashtags #AuditKPU in the 2024 Election, "Thesis of the Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya".**

**Keywords:** *Public Opinion Formation, Twitter, Social Network Analysis.*

*This research discusses the formation of public opinion that emerged regarding the alleged KPU fraud case in the Twitter hashtag #AuditKPU in the 2024 election. The development of telecommunications and information technology in the current era of globalization has caused public opinion to be increasingly given the widest possible position and access in participating in the dynamics of government administration. This study aims to describe the formation of public opinion on Twitter social media, especially in the case of alleged cases of KPU fraud in the Twitter hashtag #AuditKPU in the 2024 election.*

*This study uses a Social Network Analysis (SNA) approach method using the help of Netlytic software to help obtain Twitter social media data in #AuditKPU hashtags. The theory used in the research is Bernard Hennessy's theory of public opinion formation.*

*The results of research based on data analysis that researchers have conducted found that, Twitter is able to play a role in the formation of public opinion based on the results of SNA, that public opinion in #AuditKPU hashtags is digital activism that occurs organically and is not controlled by certain actors or organizations. The formation of public opinion on the Twitter hashtag #AuditKPU also occurs because it has fulfilled the factors of public opinion formation as conveyed by Bernard Hennessy among them are (1) presence of an issue, where the issue contained in this study is an indication of fraud committed by the KPU when verifying political party data of candidates participating in the 2024 election voiced by the Prima political party. (2) the nature of publics, in accordance with the observations and data obtained by researchers, then what is meant as an interested group is the Prima political party. (3) complex of preferences, this option is in the form of a request to postpone the 2024 election or stop the 2024 election process until the KPU must be audited. (4) expression of opinion, the public expresses their opinions or opinions regarding alleged cases of KPU fraud on #AuditKPU hashtags through various means of delivery, can be in the form of images, writings, suggestions, criticisms, and so on. And (5) number of persons involved.*



D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Tahap-Tahap Penelitian .....	48
F. Teknik Keabsahan Data .....	50
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA.....	53
A. Penyajian Data .....	53
1. Profil Tagar Twitter #AuditKPU.....	53
2. Dataset Tagar #AuditKPU pada <i>Netlytic</i> .....	59
3. Data Statistik Unggahan Tagar #AuditKPU pada <i>Netlytic</i> .....	60
4. Data Akun Dominan Unggahan Tagar #AuditKPU pada <i>Netlytic</i> .....	61
5. Data <i>Network In-Degree</i> Unggahan Tagar #AuditKPU pada <i>Netlytic</i> ...	62
6. Data <i>Network Out-degree</i> Unggahan Tagar #AuditKPU pada <i>Netlytic</i> ..	63
7. Data Visualisasi Jaringan Unggahan Tagar #AuditKPU pada <i>Netlytic</i> ..	64
8. Data Kata Unggahan Tagar #AuditKPU pada <i>Netlytic</i> .....	66
9. Data <i>Network Properties</i> Unggahan Tagar #AuditKPU pada <i>Netlytic</i> ..	67
10. Data <i>Degree Centrality</i> Unggahan Tagar #AuditKPU pada <i>Netlytic</i> .....	69
11. Data <i>Closeness Centrality</i> Unggahan Tagar #AuditKPU pada <i>Netlytic</i>	70
12. Data <i>Betweenness Centrality</i> Unggahan Tagar #AuditKPU pada <i>Netlytic</i> .....	71
B. Analisa Data.....	72
1. Pembentukan Opini Publik Terkait Dugaan Kasus Kecurangan KPU dalam Tagar Twitter #AuditKPU .....	72
BAB V.....	92
PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA .....	94
<i>Lampiran 1 Pedoman Wawancara</i> .....	100
<i>Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara</i> .....	101
<i>Lampiran 3 Jadwal Penelitian</i> .....	102
<i>Lampiran 4 Biodata Peneliti</i> .....	103

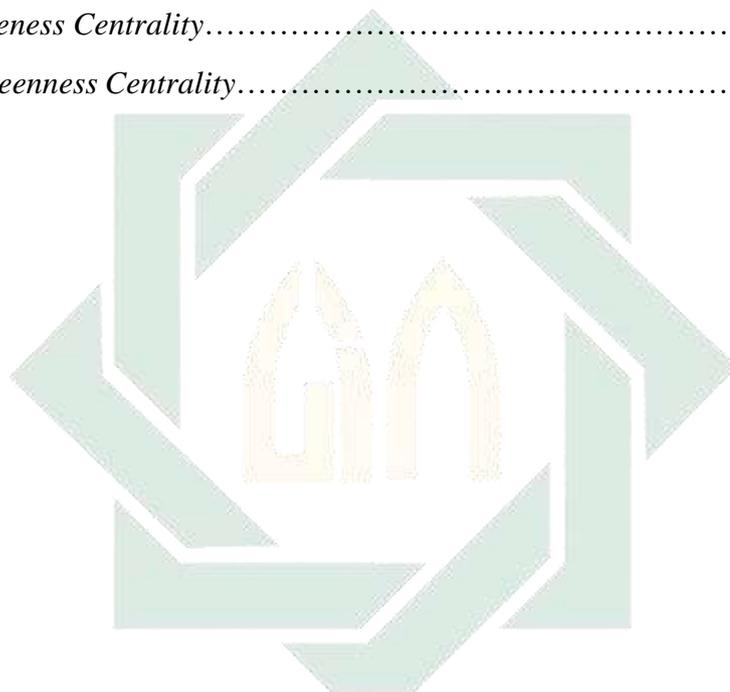


Gambar 4.20 Unggahan Berupa Tulisan pada Tagar #AuditKPU.....	87
Gambar 4.21 Unggahan Berupa Gambar pada Tagar #AuditKPU.....	88
Gambar 4.22 Unggahan Berupa Informasi pada Tagar #AuditKPU.....	89
Gambar 4.23 Unggahan Berupa Informasi pada Tagar #AuditKPU.....	90
Gambar 4.24 Unggahan Berupa Persuasi pada Tagar #AuditKPU.....	90
Gambar 4.25 Unggahan Bersifat Persuasi pada Tagar #AuditKPU.....	91
Gambar 4.26 Unggahan Berupa Koersif pada Tagar #AuditKPU.....	92
Gambar 4.27 Unggahan Berupa Kritik pada Tagar #AuditKPU.....	93
Gambar 4.28 Unggahan Berupa Saran pada Tagar Twitter #AuditKPU.....	94
Gambar 4.29 Unggahan Pro pada Tagar Twitter #AuditKPU.....	95
Gambar 4.30 Unggahan Kontra pada Tagar Twitter #AuditKPU.....	96
Gambar 4.31 Unggahan Netral pada Tagar Twitter #AuditKPU.....	97

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**DAFTAR TABEL**

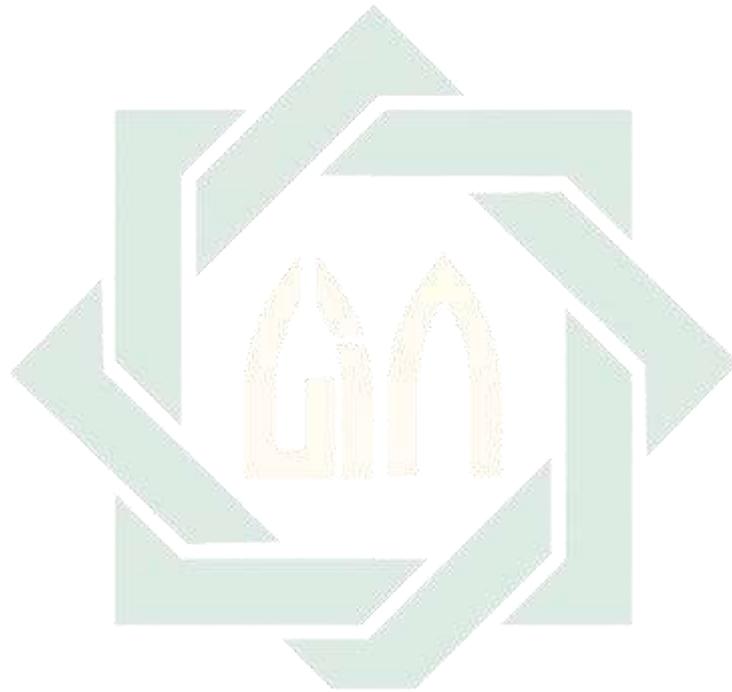
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 4.1 <i>Degree Cebtrality</i> .....	69
Tabel 4.2 <i>Closeness Centrality</i> .....	70
Tabel 4.3 <i>Betweenness Centrality</i> .....	71



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**DAFTAR BAGAN**

Bagan 2.1 Pemetaan Studi Pembentukan Opini Publik.....36  
Bagan 3.1 Peta Tahapan Metodologi Penelitian.....48



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini membahas tentang pembentukan opini publik melalui platform media sosial Twitter dengan tagar #AuditKPU. Latar belakang penelitian ini yaitu adanya fenomena penggunaan media sosial Twitter yang banyak dimanfaatkan sebagai saluran komunikasi politik yang mempunyai pengaruh dalam menentukan sikap politik individu, sehingga dapat membentuk opini publik dikalangan masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pemilihan platform Twitter dalam pembentukan opini publik. Meskipun penelitian terkait pembentukan opini publik melalui platform media sosial Twitter telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, akan tetapi yang menjadi pembeda adalah dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *Social Network Analysis* (SNA) dengan menggunakan bantuan software *Netlytic* untuk membantu menganalisa data. *Netlytic* adalah penganalisis teks dan jejaring sosial berbasis *cloud* yang dapat meringkas data tekstual secara otomatis dan menemukan jaringan komunikasi dari postingan media sosial yang dapat diakses publik. *Netlytic* ialah robot *artificial intelligence* yang digunakan dalam pengambilan data. Selain itu, dengan menggunakan tagar #AuditKPU peneliti ingin melihat bagaimana pembentukan opini-opini terkait kasus kecurangan KPU yang terdapat pada tagar tersebut, yang mana tagar tersebut adalah tagar yang sedang hangat diperbincangkan dan telah memuat sekitar 2500 *tweets* (dari tanggal 28 Desember 2022 hingga tanggal 04 Januari 2023) yang menyita perhatian publik.

Terbentuknya opini publik di media sosial Twitter yang sering digunakan oleh politikus maupun masyarakat sebagai media untuk menyampaikan pendapatnya menjadi alasan peneliti memilih media sosial Twitter. Selain itu juga ialah karena Twitter menjadi media sosial penyebar informasi yang paling *update* dibandingkan dengan media sosial yang lainnya, serta adanya fitur tagar yang dimiliki Twitter menjadikan seseorang akan lebih mudah mencari atau menemukan isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan hanya dengan melihat *trending topic* atau mengetik topik tagar tertentu pada aplikasi Twitter.

Media sosial memiliki andil dalam menciptakan panggung-panggung sosial. Panggung-panggung sosial yang tadinya miskin perhatian, oleh media mendadak berubah menjadi terkenal/fenomenal hanya dengan perantara digital disertai dengan perubahan format dialog yang dapat menjadi diskusi interaktif. Beberapa kajian penelitian terkait pembentukan opini publik yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya menyatakan bahwa media sosial mempunyai kekuatan/pengaruh dalam membentuk persepsi atau opini. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki kontribusi sebagai bahan literatur terkait pembentukan opini publik di media sosial Twitter.

Dilansir dalam Tirto.id (21/3/2018), Peter Vermeij dalam jurnalnya yang berjudul "*Twitter Link Between Politicians and Journalists*" menyebutkan bahwa Twitter ialah media sosial dengan perspektif penyebar informasi. Alasan Twitter disebut sebagai penyebar informasi karena mayoritas tagar (*hashtag*) *trending topic* yang sedang tren di Twitter menjadi *headline news*

CNN.<sup>1</sup> Hal tersebut disebabkan oleh kekuatan Twitter sebagai corong berita konvensional, sehingga banyak yang memanfaatkannya, khususnya para politisi. Maka dari itu, tidak heran jika opini publik mudah terbentuk dan kerap kali dijumpai dalam media sosial Twitter.

Opini publik merupakan pendapat kelompok masyarakat atau paduan kesatuan yang selaras dari pendapat-pendapat melalui diskusi sosial para pemangku kepentingan. Cutlip dan Center Helena Ollie menjelaskan opini publik ialah jumlah total (akumulasi) dari pendapat individual terhadap isu atau fenomena pada diskusi terbuka dan mempunyai pengaruh pada sekelompok orang.<sup>2</sup> Dasar dari pembentukan opini menurut Moore ialah sikap (*attitude*). Menurut Sunarjo, perilaku, sikap, dan opini tidak bisa dipisahkan.<sup>3</sup> Secara umum, opini terdiri dari beberapa jenis, yakni: *pertama* opini yang berupa ide atau gagasan, *kedua*, opini tentang ideologi atau keyakinan, dan *ketiga*, opini yang berwujud suatu pemikiran.

Di Indonesia, pendapat umum (opini publik) ialah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses demokrasi dan HAM (hak asasi manusia), sebagaimana pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang hak dan kebebasan bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya dihadapan umum. Demikian juga amanat pada Sila ke-4 Pancasila tentang hak-hak rakyat untuk mempertimbangkan musyawarah mufakat pada proses

---

<sup>1</sup> Zaenuddin, Bagaimana Twitter Memengaruhi Opini Publik dan Preferensi Politik, diakses pada 5 Maret 2023 pukul 19.46 WIB, <https://tirto.id/bagaimana-twitter-memengaruhi-opini-publik-dan-preferensi-politik-cGre>.

<sup>2</sup> Helena Ollie, *Opini Publik*, (Jakarta: PT. Indeks, 2007).

<sup>3</sup> Sunarjo Djunasih, *Opini Publik*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), 31.

pengambilan atau menetapkan sebuah keputusan yang berdasar pada nilai-nilai kemandirian, kebijaksanaan, serta kepemimpinan.

Dengan berkembangnya teknologi telekomunikasi dan informasi pada era globalisasi saat ini, opini publik kian diberikan kedudukan atau akses yang seluas-luasnya dalam berpartisipasi pada dinamika pengelolaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan nasional, serta bermasyarakat. Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi yang kian pesat dan dinamis tidak lagi semata-mata hanya untuk konsumsi ekonomi dan bisnis atau kewirausahaan, melainkan telah menyelami sendi-sendi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan berpemerintahan disegala bidang, terutama dibidang politik dan demokrasi.

Teknologi telekomunikasi dan informasi telah bertransformasi menjadi salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat diberbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Contoh dari jenis perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi yang dimaksud ialah dengan hadirnya jejaring media sosial. Kottler dan Keller mendefinisikan media sosial sebagai media yang dimanfaatkan penggunaanya untuk dapat berbagi teks, audio, video, *image*, dan informasi dengan orang lain.<sup>4</sup>

Perkembangan media sosial kian didorong oleh kemajuan teknologi internet dan *handphone*, maka dari itu dapat diakses dimana saja dan kapan saja hanya dengan bermodalkan *handphone*. Akses yang cepat telah menyebabkan

---

<sup>4</sup> Philip Kottler dan Kevin Lane Keller, *Handbook of Research of Effective Advertising Strategies in The Social Media Age*, (Cambridge: IGI Global, 2016), 338.



pengguna Twitter terbanyak di dunia.<sup>5</sup> Platform ini memiliki fitur tagar (*hashtag*) dan *trending topic* dimana para pengguna dapat melihat dan mengikuti topik yang sedang hangat diperbincangkan. Twitter ialah sebuah situs web yang dimiliki dan dikelola oleh Twitter Inc., yang menyediakan jejaring sosial berupa *microblogging* tempat pengguna dapat membuat, mengunggah, dan membaca pesan yang dikenal dengan cuitan (*tweet*). *Tweet* merupakan teks tertulis yang ditampilkan di halaman profil atau beranda pengguna.

Di Indonesia, Twitter kerap digunakan sebagai wadah untuk berbagi informasi, mulai dari informasi antar-personal, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Kemudahan akses informasi juga sering digunakan untuk memulai diskusi dan menginisiasi gerakan untuk mengangkat isu-isu penting dalam kehidupan sosial politik. Salah satu isu yang sedang hangat diperbincangkan di Twitter ialah adanya dugaan kecurangan KPU pada Pemilu 2024 dalam tagar #AuditKPU yang muncul sebagai bentuk protes kepada KPU terkait adanya indikasi prosedur verifikasi partai politik calon peserta pemilu yang tidak transparan (dimanipulasi), sehingga banyak oknum yang mendesak untuk menghentikan sementara tahapan pemilu 2024 agar KPU diaudit. Tagar tersebut bermula karena adanya partai-partai politik yang tidak lolos dalam proses verifikasi oleh KPU pada pemilu 2024, satu diantara partai politik tersebut ialah Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

---

<sup>5</sup> Cindy Mutia Annur, Jumlah Pengguna Twitter Terbanyak di Dunia (Per Januari 2022), diakses pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 21.35 WIB, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/pengguna-twitter-indonesia-masuk-daftar-terbanyak-di-dunia-urutan-berapa>.

Dikutip dari kumparanNEWS “Partai Prima menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor KPU RI pada Kamis (8/12/22). Partai Prima menilai KPU tidak transparan dalam pengelolaan proses tahapan pemilu 2024. Mereka merasa dicurangi karena di beberapa daerah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jubir dari Partai Prima mengatakan keinginan agar KPU diaudit, audit legal dan audit teknologi informasi, kemudian audit masalah teknis pelaksanaan proses pendaftaran partai politik karena mereka melihat banyak ketidaktransparanan”.<sup>6</sup> Partai Prima akan terus berdemonstrasi menuntut keadilan. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari jalur hukum dengan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga demonstrasi ke jalanan dan melakukan aksi melalui media sosial dalam gerakan tagar #AuditKPU di Twitter. Hingga berita ini diturunkan, KPU belum memberikan konfirmasi. Meskipun saat ini tahapan Pemilu 2024 telah memasuki verifikasi faktual. Dugaan kecurangan dalam tahapan verifikasi faktual juga sebelumnya dilontarkan sejumlah partai politik lainnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah badan pemerintahan negara yang menyelenggarakan pemilu keempat di Indonesia yang dibentuk setelah pemilu Demokrasi tahun 1995. KPU memiliki tanggung jawab penuh dalam mengawasi setiap tahapan pemilu, mulai dari persiapan dan pelaksanaan pemilu, hingga proses perhitungan surat suara dan penetapan pemenang pemilu. Selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu di setiap

---

<sup>6</sup> KumparanNEWS, KPU Tanggapi Tuntutan Partai Prima dan Partai Republik soal Audit, diakses pada 6 Januari 2023 pukul 21.28 WIB, <https://kumparan.com/kumparannews/kpu-tanggapi-tuntutan-partai-prima-dan-partai-republikku-soal-audit-1zOtWsqKSzP>.

tahapannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga harus menyelenggarakan pemilu secara aman dan damai. Oleh sebab itu, KPU diharuskan untuk bekerja secara independen dan transparan.<sup>7</sup>

Dengan adanya gerakan tagar #AuditKPU di media sosial Twitter, bagi publik media sosial kini menjadi ruang virtual untuk menyampaikan beragam aspirasinya, termasuk kritik terhadap lembaga negara. Tagar (*hashtag*) berfungsi sebagai label yang menyatukan keseluruhan pendapat atau opini tersebut menjadi satu gerakan. Pembentukan opini publik terkait dugaan kasus kecurangan KPU pada pemilu 2024 dalam penelitian ini akan diamati melalui pemaknaan cuitan (*tweet*) yang terdapat pada tagar #AuditKPU.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah **“Bagaimana pembentukan opini publik yang muncul terkait dugaan kasus kecurangan KPU dalam tagar Twitter #AuditKPU pada pemilu 2024?”**

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, peneliti melakukan penelitian dengan tujuan mendeskripsikan terbentuknya opini publik yang muncul terkait dugaan kasus kecurangan KPU dalam tagar Twitter #AuditKPU pada pemilu 2024.

---

<sup>7</sup> Solihah, Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 3, no. 1 (2018): 73-88 tahun.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat terhadap perkembangan ilmu politik, khususnya mengenai opini publik di media sosial secara teoritis dan praktis. Diantaranya yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah kajian politik dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu politik khususnya pada subbagian Opini Publik. Serta hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dalam mempelajari pembentukan opini publik di media sosial.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam memahami pembentukan opini publik di Twitter terkait dugaan kasus kecurangan KPU pada pemilu 2024.

#### **E. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual diartikan sebagai penjelasan tentang konsep yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Pembentukan Opini Publik: Dugaan Kasus Kecurangan KPU dalam Tagar Twitter #AuditKPU pada Pemilu 2024”. Dibawah ini merupakan definisi konseptual yang terkait, yakni sebagai berikut:

## 1. Opini Publik

Menurut Cutlip & Center, Opini adalah sikap atau ekspresi terhadap suatu isu yang kontroversial, yang menghasilkan pendapat berbeda-beda.<sup>8</sup> Opini muncul sebagai tanggapan terbuka terhadap suatu isu masalah. Subjek dari suatu opini biasanya merupakan isu terkini. Opini adalah reaksi pertama ketika seseorang mengalami keraguan tentang sesuatu yang lain dari kebiasaan, ketidakcocokan, dan adanya perubahan penilaian. Elemen-elemen ini mendorong orang untuk saling mempertentangkannya.

Dalam tulisannya yang berjudul “*Communication and Public Opinion*” (Komunikasi dan Pendapat/Opini Publik), Bernard Berelson mengemukakan bahwa dengan pendapat publik diartikan *people's response* atau jawaban rakyat (persetujuan, ketidaksetujuan/penolakan atau sikap acuh tak acuh) terkait isu-isu atau hal-hal yang bersifat politis dan sosial yang memerlukan perhatian umum, seperti hubungan internasional, kebijaksanaan dalam negeri, pemilihan (umum) untuk calon-calon, dan hubungan antar kelompok etnik. Menurut Cutlip & Center dalam bukunya “*Effective Public Relation*”, opini publik adalah suatu hasil penyatuan dari pendapat individu-individu tentang masalah umum.<sup>9</sup>

Sebutan opini publik dapat digunakan untuk merujuk pada serangkaian pendapat yang telah diungkapkan oleh individu. Sejalan dengan yang

---

<sup>8</sup> Cutlip, Scott M, Allen H. Center, & Glen M. Brown, *Effective Public Relations*, Edisi Kesembilan, (Jakarta: Prenata Media Group, 2016), 100.

<sup>9</sup> Ibid., 100.



*on a social issue*". Dalam definisi ini terdapat 3 unsur yaitu, dinyatakan (*express*), sikap (*attitude*), masalah masyarakat (*social issue*).

## 2. Dugaan Kasus Kecurangan KPU pada Pemilu 2024

Sejumlah dugaan kecurangan KPU pada pemilu 2024 dalam proses verifikasi partai politik (parpol) terkuak ke publik. Proses verifikasi faktual partai politik peserta pemilu dinilai terlalu rumit. Dikutip dari CNN Indonesia, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra bahkan menyebutkan jika semua syarat yang ada dalam UU Pemilu benar-benar diterapkan KPU dalam proses verifikasi, maka tidak akan ada partai politik yang lolos menjadi peserta pemilu. Dalam Pasal 173 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, syarat partai politik untuk mengikuti pemilu salah satunya yaitu memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten/kota. Menurut Yusril, aturan tersebut tidak sepenuhnya masuk akal. Hal ini dikarenakan tidak semua wilayah mempunyai banyak penduduk, sementara partai politik yang mendaftar ada puluhan.<sup>13</sup>

Rumitnya syarat verifikasi faktual parpol peserta pemilu ini membuka celah adanya kecurangan. Partai Ummat misalnya, diduga dijegal agar tidak lolos dalam verifikasi peserta pemilu 2024. Sejumlah anggota KPU daerah mengaku ada intimidasi dari KPU pusat agar tak meloloskan partai tersebut.

---

<sup>13</sup> Andry Novelino, Yusril, Verifikasi Parpol dan Dugaan Kecurangan KPU di Pemilu 2024, diakses pada tanggal Jumat 17 Maret 2023 pukul 00.59 WIB, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230113100052-32-899888/yusril-verifikasi-parpol-dan-dugaan-kecurangan-kpu-di-pemilu-2024>.

Sementara itu dalam rapat dengar pendapat umum (RPDU) antara Komisi II DPR dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, terungkap dugaan kecurangan agar Partai Gelora diloloskan jadi peserta pemilu.<sup>14</sup>

Indikasi kecurangan juga disuarakan oleh Partai Prima, hal ini bermula ketika Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) mengungkapkan pada awal Desember 2022 lalu, bahwa KPU sengaja menetapkan partai baru tersebut tidak memenuhi syarat administrasi di Papua, walaupun mereka memenuhi syarat. Dugaan ini muncul dari koalisi organisasi sipil yang mengklaim KPU telah melakukan manipulasi data saat proses pengecekan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024.

Dalam kesimpulannya, ditemukan anggota komisioner di daerah maupun pegawai teknis KPU di beberapa daerah yang menyampaikan adanya dugaan pemalsuan atau kecurangan dalam proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024. Lebih lanjut, hal ini juga terjadi karena adanya intimidasi yang dilakukan oleh KPU Pusat dan KPU Provinsi kepada KPU Daerah.

### 3. Twitter

Twitter merupakan aplikasi yang didirikan pada tahun 2006 oleh Jack Dorsey. Situs web ini dimiliki serta dijalankan oleh Twitter Inc. Twitter juga merupakan media sosial yang digemari dan populer dikalangan

---

<sup>14</sup> Andry Novelino, Yusril, Verifikasi Parpol dan Dugaan Kecurangan KPU di Pemilu 2024, dikases pada tanggal Jumat 17 Maret 2023 pukul 00.59 WIB, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230113100052-32-899888/yusril-verifikasi-parpol-dan-dugaan-kecurangan-kpu-di-pemilu-2024>.

masyarakat. Media sosial Twitter ini masih banyak digunakan masyarakat Indonesia meskipun telah banyak aplikasi baru yang diluncurkan. Situs web yang dimiliki Twitter ini menyajikan berbagai sarana untuk melakukan pesan singkat dan postingan singkat yang disebut dengan *microblogging online* dan memperkenankan penggunaannya untuk berbagi konten yang kini berupa teks tertulis 300 katakter. Zarela dalam Setyani berpendapat bahwa Twitter ialah media sosial yang dapat menyebarkan informasi secara singkat dan jelas. Selain itu melalui Twitter dapat diketahui informasi yang sedang populer melalui tagar (*hashtag*) trending dipencarian.<sup>15</sup>

Menurut Milstein dan O'reilly berpandangan bahwa Twitter merupakan sarana yang dapat membuat pesan dan telah memiliki ciri-ciri yang sama dengan sarana komunikasi sebelumnya. Dalam Twitter terdapat fitur yang serupa dengan surat elektronik (E-mail), *Short Message Service* (SMS), blogging, dan lain lain. Selain itu Twitter juga menjadi penghubung atau sarana dalam perekonomian seperti bisnis dan melalui Twitter ini membuat perusahaan terlibat dengan konsumen, mitra dan konstituen langsung secara pribadi maupun publik.<sup>16</sup> Hal demikian karena adanya keunggulan Twitter yang tidak dimiliki oleh media lain. Contohnya *tweet, retweet, mention, dan reply*.

---

<sup>15</sup> Syailendra, Yuliana, Rita, Penggunaan Sosial Media Twitter dalam Komunikasi Organisasi (Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Penanganan Covid-19), *Journal of Islamic and Law Studies* 4, no 2 (2020): 66.

<sup>16</sup> Tim O'Reilly dan Sarah Milstein, *The Twitter Book 2<sup>nd</sup> Edition* (USA: O'Reilly Media, Inc 2009), 7.

Didalam Twitter terdapat fitur *hashtag*. *Hashtag* digunakan untuk menandai *tweet* atau kicauan yang relevan dengan suatu topik tertentu dan memudahkan pengguna lain untuk menemukannya. Disertakannya *hashtag* topikal dalam kicauan atau cuitan berarti bahwa pesan tersebut memiliki potensi untuk menjangkau jauh lebih banyak daripada pengikut pengguna yang ada.<sup>17</sup>

Aplikasi yang muncul pada tahun 2006 kini telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dalam beragam bidang tertentu, seperti sebagai media dalam melaksanakan kampanye politik, medium protes, wadah pembelajaran, dan alat komunikasi darurat. Small menyebutkan, bahwa ada 2 (dua) jenis hubungan yang tercipta dalam Twitter. Pertama, mengikuti (*following*) yaitu ketika seseorang dapat mengetahui siapa saja yang mengunggah kicauan (*tweet*) di Twitter. Kedua, diikuti (*follower*) adalah kondisi dimana seseorang diikuti oleh beberapa akun lain pada akun Twitternya. Small juga menjelaskan menjadi *following* dan *follower* dapat menciptakan hubungan resiprokal, pun kegiatan komunikasi dalam Twitter akan saling terhubung ketika satu akun terjalin dengan akun lainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Dini Nur Asih & Muhamad Rosit, Opini Publik di Media Sosial: Analisis Isi Opini Kandidat Ahok-Djarot dan Anies-sandi di Twitter, *CoverAge: Journal of Strategic Communication* Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila 8, no 2 (2018): 47.

<sup>18</sup> Fatanti, M, Twitter dan Masa Depan Politik Indonesia: Analisis Perkembangan Komunikasi Politik Lokal Melalui Internet, *Jurnal IPTEKKOM: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi*, 7.



diambil oleh peneliti. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi konseptual yang memuat definisi atau pengertian yang masih berbentuk konsep dan bersifat abstrak, definisi konseptual berisi definisi-definisi yang berhubungan dalam penelitian yang dilakukan terkait “Pembentukan Opini Publik Dugaan Kasus Kecurangan KPU dalam Tagar Twitter #AuditKPU pada Pemilu 2024”, diantaranya yakni definisi opini publik, dugaan kasus kecurangan KPU pada pemilu 2024, Twitter, dan tagar #AuditKPU. Serta pada poin terakhir terdapat sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi tentang penelitian terdahulu (*literature review*) yang sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan dan kerangka teori. Hal ini bertujuan untuk dapat mengetahui perbedaan dan orisinalitas dari penelitian terdahulu (*literature review*) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada bagian ini juga akan dijelaskan teori yang digunakan pada penelitian ini, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pembentukan opini publik oleh Bernard Hennessy.

BAB III Metodologi Penelitian, berisi metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yang diangkat. Bagian ini terdiri dari beberapa sub-bab antara lain, yakni: a) Pendekatan Penelitian, peneliti menggunakan pendekatan *Social Network Analysis* b) Lokasi dan Waktu Penelitian, terdapat penjelasan dimana lokasi penelitian dilakukan, lokasi penelitian ini yaitu pada tagar #AuditKPU di media sosial Twitter, sedangkan waktu penelitian menjelaskan waktu yang digunakan peneliti dalam proses penelitian dan estimasi waktu yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mengambil data, c)

Sumber Data, d) Teknik Pengumpulan Data, e) Tahap-tahap penelitian, memuat identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data dengan menggunakan (*Netlytic* dan nilai sentralitas), dan hasil, f) Teknik Keabsahan Data,

BAB IV Penyajian dan Analisa Data, berisi gambaran umum subjek penelitian dan penjelasan data dan fakta subyek penelitian terkait, yakni terdapat profil tagar Twitter #AuditKPU serta hasil data yang diperoleh dari tagar Twitter #AuditKPU dengan bantuan *Netlytic*. Pada bab ini juga terdapat jawaban dari rumusan masalah yang dikolaborasikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori pembentukan opini publik oleh Bernard Hennessy.

BAB V Penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk pihak yang berkaitan dalam penelitian ini sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

## BAB II KAJIAN TEORITIK

### A. Penelitian Terdahulu (*Literature Review*)

Studi-studi tentang opini publik selama ini dikaji secara mendalam oleh beberapa ilmuwan dari bermacam-macam rumpun ilmu beberapa diantaranya Hukum dan Sosial Politik. Terdapat beberapa artikel yang membahas kajian penunjang dalam penelitian ini, diantaranya telah diangkat oleh beberapa peneliti dalam judul tulisannya, baik berupa jurnal, artikel ataupun dalam bentuk tulisan lainnya. Metode yang dipilih untuk digunakan dalam penelitiannya pun berbeda-beda.

Dengan berkembangnya teknologi telekomunikasi dan informasi di era globalisasi ini, opini masyarakat yang terakumulasi menjadi diskursus publik dapat diamati diberbagai jenis media, seperti media massa ataupun media sosial. Wacana sosial politik memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kebijakan ditingkat elit, terkhusus dengan permasalahan-permasalahan publik. Dalam penelitian ini akan terfokus pada pembentukan opini publik yang ada di media sosial Twitter.

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Awad dkk (2020) “Opini Publik Terhadap Penerapan *New Normal* di Media Sosial Twitter” menunjukkan bahwa suatu fenomena atau masalah yang terjadi atau menjadi berita akan segera direspon dan disebarakan dengan cepat oleh para pengguna media sosial khususnya Twitter. Respon dan penyebaran suatu masalah atau fenomena tersebutlah yang kemudian dapat menjadikan fenomena itu menjadi

trending dan hangat diperbincangkan banyak orang, hal demikian yang akhirnya membentuk akan munculnya suatu pendapat atau opini yang berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi. Penelitian ini menggunakan konsep opini publik yang dikategorisasikan menjadi positif, negatif, dan netral. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kuantitatif<sup>20</sup>

Era digital membawa manusia pada kehidupan yang tidak dapat terlepas dari kecanggihan teknologi telekomunikasi dan informasi. Sejalan dengan penelitian Bambang Arianto (2020) dalam judul “Pemanfaatan Aplikasi *Drone Emprit Academic* dalam Menganalisis Opini Publik di Media Sosial” menyatakan bahwa peran krusial media sosial semakin berperan besar dalam membentuk opini publik di era digital. Media sosial juga dapat menjadi saluran untuk keterlibatan komunitas di seluruh dunia. Banyak informasi atau berita terkini yang kontroversial dan diperdebatkan oleh publik bersumber dari media sosial. Hal ini membuat media sosial semakin inspiratif dalam membangun dan membentuk opini publik. Bukan hal yang aneh juga, jika banyak pihak mencoba menciptakan opini publik yang bermula dari media sosial dan kemudian bergerak ke opini global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melakukan analisis data hasil percakapan media sosial dengan bantuan aplikasi *Drone Emprit Academic* (DEA) Universitas Islam Indonesia.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Awad, Zhafira, Adinda, Opini Publik Terhadap Penerapan New Normal di Media Sosial Twitter, *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila 11, no 1 (2020): 19-26.

<sup>21</sup> Bambang Arianto, Pemanfaatan Aplikasi *Drone Emprit Academic* dalam Menganalisis Opini Publik di Media Sosial, *Journal of Social Politics and Governance* 2, no 2 (2020).

Media sosial, kanal atau sarana pergaulan melalui lajur *online* diinternet, sekarang telah ramai dipergunakan masyarakat untuk mendapatkan dan menyebarkan berita atau informasi, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Qadri (2020) “Pengaruh Media Sosial dalam Membangun Opini Publik” menjelaskan adanya pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini publik. Hal ini terletak pada komunikasi publik yang dilakukan di media sosial yang mampu menjadi perantara komunikator publik atau politik dengan masyarakat. Sebagai saluran komunikasi publik, media sosial dapat mempengaruhi dan menentukan perilaku politik, ini dikarenakan media sosial turut berperan dalam terbentuknya opini publik.<sup>22</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mampu berperan untuk mempengaruhi opini seseorang atau masyarakat yang kemudian akan menentukan sikap politiknya. Di beberapa negara, para pemain politik berlomba-lomba memanfaatkan media sosial untuk meraih kemenangannya dalam kompetisi politik.

Media sosial yang dipilih untuk diteliti dalam penelitian ini ialah media sosial Twitter. Namun banyak peneliti lain yang juga meneliti media sosial lainnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Aminah Amirah (2019) “Peran Media Sosial *Facebook* dalam Proses Pembentukan Opini Publik Menjelang Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Aceh Jaya” yang meneliti media sosial Facebook, ia mengatakan Facebook ialah media sosial yang paling besar penggunaannya diberbagai lapisan masyarakat. Menurutnya, media

---

<sup>22</sup> Muhammad Qadri, Pengaruh Media Sosial dalam Membangun Opini Publik, *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no 1 (2020).

Facebook sangat esensial dalam berkehidupan, karena disitulah masyarakat bisa melihat dan membaca informasi atau berita yang dibutuhkan untuk mengetahui sebuah peristiwa yang sedang terjadi saat itu juga. Media mempunyai kekuatan dalam membentuk persepsi atau opini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan ke lapangan. Dalam hal ini teknik pengumpulan data lapangan yakni dilakukan dengan cara observasi informasi terkait melalui akun media sosial Facebook peneliti.<sup>23</sup>

Bambang Arianto (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Salah Kaprah Ihwal Buzzer: Analisis Percakapan Warganet di Media Sosial” mengatakan, era revolusi industri 4.0 membawa seluruh lapisan masyarakat untuk kian tinggi dalam menggunakan media sosial yang berhubungan dengan kemajuan profesi *buzzer* kian tumbuh baik disegala konteks, tak terkecuali politik. Peran pemasaran digital semakin memerlukan *buzzer* untuk menyempurnakan isi pesan atau konten. Dengan demikian, media sosial berperan menciptakan pertumbuhan bagi operator internet atau pelaku-pelaku jaringan yang tanpa sadar bertindak sebagai *followers*, *influencer*, dan *buzzer*. Hal ini terlihat dari aktivitas yang dilakukan seperti *retweet*, *repost*, dan *re-share* sebagai kegiatan *buzzer* yang bertujuan untuk mempertegas isi pesan. Kandidat dan partai politik sangat membutuhkan *buzzer* untuk membantu mereka dalam proses kampanye politik di media sosial. Dengan membuat konten-konten politik, *buzzer* dapat

---

<sup>23</sup> Aminah Amirah, Peran Media Sosial “Facebook” dalam Proses Pembentukan Opini Publik Menjelang Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Aceh Jaya, Jurnal Ilmu Komunikasi 4, no 2 (2019).

menarik perhatian publik. Sehingga dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa *buzzer* turut berkontribusi dalam membentuk atau mempengaruhi opini publik. Penelitian ini menggunakan data percakapan media sosial dari *Drone Emprit Academic* Universitas Islam Indonesia dengan kata kunci (*keyword*) BuzzeRp. Penelitian ini berpendapat bahwa terdapat salah kaprah mengenai definisi *buzzer* media sosial yang berkembang di Indonesia, sehingga menyebabkan profesi *buzzer* media sosial di Indonesia menjadi negatif.<sup>24</sup>

Devi dkk (2020) dalam judul “Penggunaan Akun Bot Media Sosial untuk Mempengaruhi Opini Publik: Sebuah Tinjauan Hukum di Indonesia), menyatakan bahwa eksistensi akun bot atau akun robot dalam media sosial digunakan sebagai permainan dari sudut pandang tertentu yang ingin ditonjolkan, kebanyakan berupa penggunaan tagar (*hashtag*). Selain argumentasi, kepribadian lawan (pihak lain) juga dapat diserang secara massif untuk mendelegitimasi suara lawan. Akibatnya, interaksi dalam wacana politik media sosial tidak lagi bersifat organik, yang dalam berada di bawah kendali orang-orang sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, dapat dinilai adanya akun bot dapat merusak kualitas demokrasi Indonesia. Selain menyebarkan informasi yang salah dan memperparah polarisasi, adanya akun bot juga mengakibatkan ketidakjelasan akuntabilitas suara yang bersifat kontraproduktif. Lebih lanjut, hasil manipulasi opini publik menggunakan akun bot yang heboh diperbicarakan melalui media sosial tidaklah orisinal

---

<sup>24</sup> Bambang Arianto, Salah Kaprah Ihwal *Buzzer*: Analisis Percakapan Warganet di Media Sosial, (JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta) 5, no 1 (2020).

semata-mata atas keresahan atau kecemasan publik, melainkan terdapat pembajakan yang bisa merugikan kepentingan publik itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, metode yang digunakan ialah metodologi penelitian normative. Metodologi ini melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan secara kolektif dimasyarakat.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini dapat dijumpai kekurangan-kekurangan yang ada pada penyampaian opini publik melalui media sosial.

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Raja dkk (2020) “Opini Publik di Media Sosial Instagram #2019GANTIPRESIDEN Vs #2019TETAPJOKOWI” yang menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari partisipasi publik di media sosial. Salah satu dampak positifnya seperti, meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam memberikan opininya melalui media sosial, hal ini dikarenakan penggunaan tagar yang ramai. Dampak negatifnya antara lain, penyalahgunaan media sosial rawan untuk menyerang pihak/institusi yang berkonflik ataupun berpemerintah, serta media sosial juga rawan dijadikan sebagai arena propaganda dan provokasi negatif yang memicu adanya konflik politik baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis *semiotic*.<sup>26</sup>

“Analisis Sentimen Opini Publik Mengenai Larangan Mudik pada Twitter Menggunakan Naïve Bayes” penelitian yang dilakukan oleh Tika Adilah dkk

---

<sup>25</sup> Devi, Amanda, Fitri, Penggunaan Akun Bot Media Sosial untuk Mempengaruhi Opini Publik: Sebuah Tinjauan Hukum di Indonesia, (Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Airlangga) 4, no 1 (2020).

<sup>26</sup> Raja, Belli, Suyanto, Opini Publik di Media Sosial Instagram #2019GANTIPRESIDEN Vs #2019TETAPJOKOWI, Jurnal Ilmu Komunikasi 9, no 3 (2020).

(2020) menyatakan bahwa media sosial Twitter sering dipergunakan untuk menyampaikan pesan berupa opini pribadi atau opini publik atas suatu diskusi tertentu yang sedang menjadi *trending topic* terkini. Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pengguna aktif harian Twitter tertinggi, menurut *Country Industry Head Twitter Indonesia*. Dengan banyaknya pengguna Twitter di Indonesia ini menyebabkan tidak jarang ditemui banyaknya pengguna Twitter yang menyampaikan opini-opininya secara *online*. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa opini masyarakat mengenai aturan larangan mudik dengan mengklasifikasikan opini kedalam 2 sentimen yaitu positif dan negatif. Klasifikasi dilakukan dengan menggunakan metode *Naïve Bayes Classifiers*.<sup>27</sup> Semakin opini tersebut banyak mendapat respon atau *engagement* maka semakin besar pula peluangnya untuk dapat dilihat dan dikunjungi banyak orang, hal ini pula yang menyebabkan seseorang yang tadinya awam dengan informasi tersebut menjadi paham dan tertarik.

Seperti yang telah diketahui, penentuan arah suatu kebijakan publik senantiasa tidak terlepas dari peranan opini publik. Di negara demokrasi seperti Indonesia, opini publik sangatlah penting karena tidak ada pemerintah yang berhasil mencapai kesuksesannya kecuali jika pemerintah peduli opini publik, sebab tujuan dari pemerintahan yang demokratis ialah sepenuhnya hanya demi kesejahteraan rakyat. Aturan yang berdasarkan dengan opini publik lebih mudah diterima di masyarakat.

---

<sup>27</sup> Tika, Yuris, Nissa, Windu, Analisis Sentimen Opini Publik Mengenai Larangan Mudik pada Twitter Menggunakan Naïve Bayes, Jurnal CoreIT 6, no 2 (2020).

Begitu pula yang disampaikan oleh Mollita Rusi dkk (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pemerintah Indonesia dalam Membentuk Opini Publik Terkait Pemberlakuan PSBB”, mengevaluasi pendapat atau persepsi publik terkait tindakan atau kinerja pemerintah ialah suatu hal yang amat penting diselenggarakan. Karena dengan persepsi publik dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang berguna untuk membentuk kebijakan yang dibuat dan input serta bermanfaat dalam pengembangan kebijakan. Dalam opini publik, media sosial mempunyai pengaruh yang kuat. Usaha untuk mendapat dukungan dari masyarakat luas dengan cepat menjadi kekuatan media sosial pada kecepatan penyebaran informasi. Selain itu, penyebaran berita di media sosial (*online*) sangat memengaruhi opini publik melalui komposisi, nada, dan pengulangannya. Berita *online* yang lebih pendek juga dapat berpengaruh kuat pada opini media sosial dibandingkan dengan berita panjang. Dalam penelitian ini juga diketahui bahwa penggunaan *opinion leader* di media sosial dapat digunakan untuk membujuk dan mengubah serta membentuk pemikiran opini publik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan melakukan penelusuran dan analisa berita pada media konvensional dan media sosial untuk mendapatkan data.<sup>28</sup>

Kajian mengenai opini publik di media sosial juga diteliti oleh Liyi Liu dkk (2022) di China dalam judul “*How Local Outbreak of Covid-19 Affect the Risk of Internet Public Opinion: A Chinese Social Media Case Study*” yang

---

<sup>28</sup> Mollita, Elis, Lesmana, Strategi Pemerintah Indonesia dalam Membentuk Opini Publik Terkait Pemberlakuan PSBB, Jurnal *Syntax Transformation* 1, no 9 (2020).

menyatakan opini publik melalui media sosial adalah proses yang kompleks dari partisipasi multi-pihak. Media sosial telah menjadi tempat utama bagi pengguna untuk memprotes atau memperdebatkan suatu peristiwa atau pendapat tertentu. Dalam penelitian ini dapat dijumpai dampak negatif dari opini publik di media sosial seperti beberapa media berita atau individu dapat menyebarkan informasi palsu atau membuat pernyataan palsu melalui akunnya. Oleh karena itu ketika banyak informasi atau pandangan terkait peristiwa yang muncul di media sosial, informasi atau rumor tersebut akan tersebar dengan mudah dan cepat. Sebagian besar informasi secara fakta atau palsu dapat diisi dan ditemui di media sosial yang merupakan cikal bakal pembentukan opini publik. Selain itu dalam penelitian ini juga dijelaskan, orang-orang dengan pendapat dan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda juga akan menyatakan pandangan atau pendapatnya melalui media sosial. Sebagian besar pengguna dengan emosi yang sama akan mengungkapkan persetujuan mereka melalui *like, comments, share* yang dapat menggiring opini publiknya. Penelitian ini menggunakan metode SMAA-FAHPSort II yang menggabungkan metode *Analytic Hierarchy Process Sort II* (AHPSort II) dengan metode *Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis* (SMAA-2) untuk mengevaluasi tingkat risiko opini publik internet media sosial.<sup>29</sup>

Di bawah ini adalah sejumlah *literature review* yang disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Liyi, Yan, Xiaoyang, *How Local Outbreak of Covid-19 Affect the Risk of Internet Public Opinion: A Chinese Social Media Case Study*, *Journal Homepage*: <http://www.elsevier.com/locate/techsoc> *Technology in Society* 71 (2022) Wuhan University of Technology.

**Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul Penelitian	Temuan Penelitian
1.	Awad dkk, <i>Opini Publik Terhadap Penerapan New Normal di Media Sosial Twitter.</i>	Respon terhadap suatu fenomena atau masalah yang menjadi trending pada akhirnya membentuk akan munculnya pendapat atau opini.
	Persamaan	Media yang diteliti dalam penelitian yang dilakukan oleh Awad dkk memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yakni meneliti media sosial Twitter.
	Perbedaan	Pada penelitian yang dilakukan oleh Awad dkk tidak menggunakan bantuan aplikasi atau software untuk memperoleh dan menganalisa data, sedangkan pada penelitian ini menggunakan bantuan software <i>Netlytic</i> . Serta, penelitian yang dilakukan oleh Awad dkk berbeda dengan penelitian ini pada metode yang digunakan. Penelitian awad dkk



	Perbedaan	Meskipun dalam penelitian Bambang Arianto dan penelitian ini sama-sama menggunakan bantuan aplikasi atau software untuk membantu memperoleh dan menganalisa data namun aplikasi atau software yang digunakan berbeda. Pada penelitian Bambang Arianto menggunakan bantu aplikasi <i>Drone Emprit Academic</i> (DEA) Universitas Islam Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bantuan software <i>Netlytic</i> .
3.	Muhammad Qadri, <i>Pengaruh Media Sosial dalam Membangun Opini Publik.</i>	Sebagai saluran komunikasi publik, media sosial dapat mempengaruhi dan menentukan perilaku politik, ini dikarenakan media sosial turut berperan dalam terbentuknya opini publik.
	Persamaan	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Qadri memiliki kesamaan dengan penelitian ini

		yakni melihat bagaimana media sosila berkontribusi dalam membentuk opini publik.
	Perbedaan	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Qadri berbeda dengan penelitian ini karena penelitian Muhammad Qadri tidak menggunakan bantuan aplikasi atau software dalam memperoleh/menganalisa data.
4.	Aminah Amirah, <i>Peran Media Sosial Facebook dalam Proses Pembentukan Opini Publik Menjelang Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Aceh Jaya.</i>	Media Facebook sangat esensial dalam berkehidupan, karena disitulah masyarakat bisa melihat dan membaca informasi/berita yang dibutuhkan untuk mengetahui sebuah peristiwa yang terjadi sehingga media mempunyai kekuatan dalam membentuk persepsi.
	Persamaan	Penelitian yang dilakukan oleh Aminah Amirah sama dengan penelitian ini pada fokus penelitian,

		yakni tentang pembentukan opini publik di media sosial.
	Perbedaan	Perbedaannya terletak pada pengambilan dan analisis data penelitian yang dilakukan Aminah Amirah tidak menggunakan bantuan aplikasi. Selain itu, perbedaan yang lain juga terletak pada media sosial yang diteliti.
5.	Bambang Arianto, <i>Salah Kaprah Ihwal Buzzer: Analisis Percakapan Warganet di Media Sosial.</i>	Dengan membuat konten-konten politik, <i>buzzer</i> dapat menarik perhatian publik. Sehingga dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa <i>buzzer</i> turut berkontribusi dalam membentuk atau mempengaruhi opini publik.
	Persamaan	Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Arianto dengan penelitian ini memiliki kesamaan pada pengambilan data dengan memanfaatkan bantuan aplikasi atau software, serta media sosial

		yang diteliti juga sama yakni Twitter.
	Perbedaan	Perbedaan terletak pada analisa datanya, penelitian Bambang Arianto menggunakan analisis isi sedangkan penelitian ini menggunakan <i>social network analysis</i> .
6.	Devi dkk, <i>Penggunaan Akun Bot Media Sosial untuk Mempengaruhi Opini Publik: Sebuah Tinjauan Hukum di Indonesia.</i>	Dalam penelitian ini dijumpai adanya kekurangan-kekurangan yang ada pada penyampaian opini publik di media sosial.
	Persamaan	Penelitian yang dilakukan oleh Devi dkk dengan penelitian ini sama-sama meneliti media sosial.
	Perbedaan	Terletak pada pengambilan data dan analisa datanya tidak menggunakan bantuan aplikasi, serta penelitian yang dilakukan oleh Devi dkk ini melihat penggunaan akun bot media sosial

		untuk mempengaruhi opini publik yang ditinjau dari segi hukum.
7.	Raja dkk, <i>Opini Publik di Media Sosial Instagram #2019GANTIPRESIDEN Vs #2019TETAPJOKOWI.</i>	Menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari partisipasi publik di media sosial.
	Persamaan	Sama-sama meneliti tentang opini publik di media sosial.
	Perbedaan	Meskipun sama-sama meneliti media sosial, namun aplikasi media sosial yang diteliti berbeda. Penelitian Raja dkk menggunakan media sosial Instagram, sedangkan pada penelitian ini menggunakan media sosial Twitter. Pada penelitian yang dilakukan oleh Raja dkk juga tidak menggunakan bantuan aplikasi/software dalam memperoleh atau menganalisa data. Analisa data dalam penelitian Raja dkk menggunakan analisis <i>semiotic</i> , sedangkan penelitian ini

		menggunakan <i>social network analysis</i> .
8.	Tika Adilah dkk, <i>Analisis Sentimen Opini Publik Mengenai Larangan Mudik pada Twitter Menggunakan Naïve Bayes</i> .	Banyak pengguna Twitter yang menyampaikan opininya secara online sehingga dapat menyebabkan seseorang yang tadinya awam dengan informasi tersebut menjadi tertarik.
	Persamaan	Sama-sama meneliti opini publik di media sosial Twitter dan menggunakan bantuan aplikasi atau software untuk membantu menganalisa data.
	Perbedaan	Meskipun sama-sama menggunakan bantuan aplikasi untuk menganalisa data namun aplikasi yang digunakan berbeda, penelitian oleh Tika Adilah dkk menggunakan bantuan <i>Naïve Bayes Classifiers</i> sedangkan penelitian ini menggunakan <i>Netlytic</i> . Serta dalam menganalisis data pun berbeda. Tika Adilah dkk menggunakan









Sistem pemerintahan yang demokratis adalah sistem pemerintahan yang responsif terhadap opini publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Hennesy (1970: 33), “... *responsiveness to public opinion is an essential ingredient of democratic government*”. Dalam konteks ini, opini publik dengan asumsi bahwa opini publik seharusnya menentukan pilihan-pilihan kebijakan.<sup>31</sup>

Bernard Hennesy (1990) dalam bukunya *Public Opinion*, mengemukakan adanya 5 (lima) faktor pemicu terbentuknya opini publik, diantaranya yaitu:<sup>32</sup>

- a. Adanya Isu (*Presence of an Issue*). Harus terdapat atau mengandung konsensus yang nyata, opini publik menumpuk disekitar isu. Isu didefinisikan sebagai situasi kontemporer yang mungkin tidak terdapat unsur kesepakatan atau setidaknya terdapat unsur kontroversial yang ada didalamnya. Isu dalam penelitian ini yaitu dugaan kasus kecurangan KPU pada pemilu 2024.
- b. *Nature of Publics*. Perlu terdapat kelompok yang dikenali dan tertarik dengan kepentingan dalam masalah tersebut. Kelompok disini mengacu pada partai politik Prima yang mana partai tersebut merasa dicurangi oleh KPU pada saat verifikasi partai calon peserta pemilu, sehingga banyak orang dari partai tersebut menyampaikan pendapatnya atau melakukan demonstrasi secara *online* melalui media sosial Twitter

---

<sup>31</sup> Puji Rianto, Opini Publik, Agenda Setting, dan Kebijakan Publik, Jurnal Komunikasi 5, no 1 (2010): 37.

<sup>32</sup> Soemirat, Betty RFS dan Yehuda, Opini Publik, (Universitas Terbuka: Tangerang Selatan 2014).

dan dengan disertakannya tagar #AuditKPU sebagai label penyatuan opini-opini terkait. Twitter dijadikan sebagai alat perhatian bagi individu atau masyarakat yang perhatian akan adanya kecurangan yang dilakukan oleh KPU. Dengan banyaknya jumlah unggahan (*tweet*) pada para pengguna, diharapkan menjadi perhatian atau peringatan bagi KPU sendiri untuk mencegah hal-hal atau kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan dan dapat merugikan suatu pihak.

- c. Pilihan yang sulit (*complex of preferences*). Merujuk pada seperangkat pendapat anggota masyarakat terhadap suatu masalah, maka harus dirumuskan terlebih dahulu bagaimana menyampaikannya dengan mempertimbangkan dampak sosial.
- d. Suatu pernyataan/opini (*expression of opinion*). Berbagai pernyataan telah menumpuk sekitar isu. Pernyataan biasanya dapat berupa kata-kata tertulis atau lisan. Menurut Bernard Henessy, opini publik internal mengacu pada sikap ketidakberkehaan publik terhadap isu tertentu yang tidak diungkapkan. Sementara opini publik tersembunyi mengacu pada sikap publik mengenai suatu isu, namun tidak menggugah atau memengaruhi perilakunya.
- e. Jumlah orang yang terlibat (*number of persons involved*). Opini publik adalah jumlah banyaknya masyarakat yang memperhatikan isu-isu. Dengan maksud mengesampingkan isu-isu kecil dengan pernyataan-pernyataan yang tidak begitu penting dari individu yang sifatnya sangat pribadi. Kemudahan yang ditawarkan oleh Twitter menjadikan media

ini dipakai oleh para penggunanya untuk membahas topik tertentu sehingga menjadi *trending topics* atau topik yang sedang menarik perhatian banyak pengguna Twitter. Hal tersebut dapat mempercepat pembentukan opini publik tentang suatu masalah yang dibahas dan sedang hangat diperbincangkan. Seperti pada kasus dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU pada pemilu 2024.

Oleh karena itu sebagian pesan dalam komunikasi politik, opini publik maupun opini politik itu sendiri pasti ada dasar bermuatan politik yang kental dan menyangkut kepentingan umum, serta bersifat terbuka dan aktual. Opini publik juga disebut sebagai kekuatan politik dan menjadi dasar negara demokrasi.

Hennesy menegaskan bahwa, “Pada setiap persoalan yang muncul, opini publik merupakan kumpulan pandangan yang terukur atau tersimpulkan, yang dipegang oleh orang-orang yang menaruh kepentingan terhadap kepentingan tersebut.”<sup>33</sup>

Melalui teori pembentukan opini publik menurut Bernard Hennesy, dapat menjadi jembatan untuk membantu melakukan analisa tentang bagaimana pembentukan opini publik yang muncul terkait dugaan kasus kecurangan KPU dalam tagar Twitter #AuditKPU pada pemilu 2024.

---

<sup>33</sup> Bernard Hennesy, *Public Opinion*, Wadsworth Inc, 1981.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode *Social Network Analysis* (SNA). *Social Network Analysis* atau yang dikenal (SNA) merupakan salah satu metode analisis dalam studi yang berkonsentrasi pada *relationship research* dan sering digunakan untuk mengukur suatu hubungan dan menggambarkan beberapa informasi dari individu. Dengan kata lain, SNA juga dapat digunakan untuk memahami hubungan dan struktur dalam jaringan. Pendekatan SNA digunakan untuk mengetahui struktur jaringan sosial dan posisi utama yang ada pada suatu jaringan. Dalam artian lain, metode SNA juga digunakan untuk menganalisis relasi atau hubungan antar aktor dalam suatu jaringan sosial. Metode ini juga digunakan untuk memberikan informasi terkait struktur dan pola jaringan serta intensitas relasi antar aktor pada suatu jaringan.<sup>34</sup>

Metode SNA juga digunakan untuk mengukur statistik jaringan komunikasi pada level mikro dengan melihat aktor pada tagar #AuditKPU di Twitter, dan level makro untuk mengukur struktur jaringan yang meliputi *diameter*, *density*, *reciprocity*, *centralization*, serta *modularity*. Metode ini berusaha menggambarkan dan menjelaskan jaringan sosial dan struktur jaringan. Jaringan adalah seperangkat aktor (*node*, dalam hal ini yaitu akun media sosial)

---

<sup>34</sup> M. Aulia Akbar dkk, Analisis Struktur Jaringan Komunikasi #SEAGAMES2022 di Twitter Menggunakan Pendekatan *Social Network Anlysis*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media 26, no 1 (2022): 4.

yang mempunyai relasi dengan aktor lain dalam tipe relasi tertentu. Relasi tersebut dapat berupa menyebut (*mention*), komentar (*reply*), atau mengunggah kembali (*retweet*).<sup>35</sup> SNA digunakan untuk mengetahui pola distribusi dan menemukan pemain kunci dalam penyebaran konten-konten di media sosial dengan melihat gambaran umum jaringan dan metrik-metrik yang ada pada SNA seperti *degree centrality* (*indegree* dan *outdegree*), *reciprocity*, dan lain sebagainya.

Metode riset digital ini digunakan untuk melihat faktor yang dapat memicu terjadinya pembentukan opini publik di Twitter terkait kasus kecurangan KPU. Software riset media digital yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Netlytic* sebagai alat pengumpul data yang nantinya akan dianalisis dan kemudian divisualisasikan.

Metode tersebut dipilih karena sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi di era digital saat ini. Khususnya ketika berfokus pada analisis jaringan sosial. Diketahui bahwa konten di media sosial tidak hanya dibuat oleh pemilik media *mainstream* dan besar. Namun, juga diproduksi oleh masyarakat luas tanpa batasan kelas sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terbentuknya opini publik yang muncul terkait dugaan kasus kecurangan KPU dalam tagar Twitter #AuditKPU pada pemilu 2024. Dalam rangka mencapai tujuan, peneliti mengumpulkan data dari Twitter melalui tagar #AuditKPU dengan

---

<sup>35</sup> Muhamad Ibnu Adam, Analisis Pola Jaringan Sosial Terhadap Pengaruh *Structural Holes Spanner* dalam Percakapan di Twitter (Studi *Social Network Analysis* pada Kasus PON XX Papua 2021).

menggunakan bantuan software *Netlytic*, data yang diperoleh juga dapat berupa gambar yang kemudian akan dideskripsikan oleh peneliti.

Sampel dari penelitian ini yaitu mencakup ksemua *tweet* atau unggahan dengan tagar #AuditKPU selama tanggal 28 Desember 2022 – 4 Januari 2023. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan software analisis bernama *Netlytic*. Peneliti menggunakan *Netlytic* untuk mendapatkan sampel selama 8 hari *tweet* atau unggahan terkait tagar #AuditKPU di Twitter dengan rentang waktu untuk pengambilan sampel sendiri terhitung mulai tanggal 28 Desember 2022 – 4 Januari 2023.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian, terutama dalam menangkap fenomena atau penelitian yang terjadi dari objek yang diteliti untuk mendapatkan data-data yang akurat. Lokasi penelitian ini yakni pada tagar #AuditKPU di media sosial Twitter. Peneliti memilih tagar #AuditKPU Twitter sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Twitter ialah media sosial penyebar informasi yang paling *update* dibandingkan dengan media sosial yang lainnya.
- 2) Tagar #AuditKPU merupakan tagar yang sedang menyita perhatian publik. Didalamnya terdapat isu atau informasi terbaru yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat.

#### b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan waktu yang digunakan peneliti dalam proses penelitian. Estimasi waktu penelitian yang digunakan peneliti ialah selama 5 bulan, yakni desember 2022 sampai April 2023.

Sedangkan waktu penelitian yang digunakan peneliti untuk mengambil data dalam tagar #AuditKPU di Twitter dengan menggunakan bantuan software *Netlytic* ialah selama 8 hari yang dimulai dari tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023.

#### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dimana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

##### a. Tagar #AuditKPU

Pengambilan data dalam tagar #AuditKPU di Twitter terkait adanya dugaan kasus kecurangan KPU pada pemilu 2024 melalui software *Netlytic* dilakukan selama 8 hari, mulai dari tanggal 28 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023. Puncak unggahan atau percakapan dalam tagar #AuditKPU berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, terjadi pada tanggal 29 Desember 2022. Sedangkan dalam mengambil *capture tweet* yang berkaitan dan dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan sejak bulan Desember 2022 hingga bulan April 2023.

##### b. Responden

Data ini didapatkan melalui wawancara dengan salah satu pakar politik untuk mendapatkan data berdasarkan sudut pandang pakar politik terkait

pembentukan opini publik di media sosial khususnya Twitter. Pakar politik yang dimaksud dalam penelitian ini ialah bapak Dr. H. Moh Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si yang merupakan salah satu dosen pada program studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam Penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung, sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah ada.

Data Primer pada penelitian ini dilakukan melalui:

##### **a. Observasi**

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara *online* pada isu atau unggahan terkait dugaan kasus kecurangan KPU pada pemilu 2024 yang terdapat pada tagar #AuditKPU yang dimulai sejak munculnya dugaan kasus kecurangan KPU pada pemilu 2024 yaitu pada bulan Desember 2022 hingga bulan April 2023.

##### **b. Software *Netlytic***

Peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan menggunakan bantuan software *Netlytic* yang merupakan software pengumpul dan analisis data media sosial. *Netlytic* adalah penganalisa teks yang ditemukan oleh Dr.

Anatoliy Gruzd<sup>36</sup> dan dikembangkan oleh *Social Media Lab* (*socialmedialab.com*) di Ryerson University.

*Netlytic* dimanfaatkan untuk membantu menganalisis berbagai komunitas dan percakapan *online* seperti dalam unggahan Twitter. Adapun kelebihan dari *Netlytic* adalah kemampuan menangkap komentar atau teks di Twitter, Youtube, RSS *Feed* atau file teks/CSV. Ini juga dapat dimanfaatkan untuk membantu menemukan topik populer dan menjelajahi topik percakapan yang sedang berkembang.

*Netlytic* dapat menggunakan analitik jaringan sosial untuk membuat, memvisualisasikan, membangun, dan menganalisis jaringan komunikasi *online* menggunakan analisis jejaring sosial. *Netlytic* dapat memetakan data media sosial dengan kode geografis (*geocode*).

Melalui software *Netlytic*, data yang diambil hasilnya dapat berupa gambar yang kemudian akan dideskripsikan oleh peneliti. Data yang diambil menggunakan bantuan software *Netlytic* ialah selama 8 (delapan) hari mulai dari tanggal 28 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023.

c. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara untuk berinteraksi dengan narasumber atau informan dalam rangka mendapatkan informasi atau pendapat terkait pembentukan opini publik di media sosial khususnya Twitter. Wawancara dilakukan dengan pakar politik bapak Dr. H. Moh Syaeful Bahar, S.Ag,

---

<sup>36</sup> Diakses pada 13 Januari 2023 pukul 02.28 WIB <https://Anatoliygruzd.com/>.

M.Si yang merupakan salah satu dosen pada program studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Wawancara dilakukan secara tidak langsung, yakni dengan melalui chat WhatsApp dikarenakan informan tidak dapat melakukan wawancara secara langsung. Teknik pengumpulan data wawancara dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan terkait fokus penelitian yakni pembentukan opini publik di media sosial Twitter. Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juli 2023.

Sedangkan data sekunder didapatkan melalui:

a. Dokumentasi

Dokumentasi didefinisikan sebagai metode pengumpulan data menggunakan buku, catatan (dokumen), gambar atau foto, buku. Penjelasan Sanapiah Faesal pada metode dokumentasi, sumber informasinya berupa materi tertulis atau terekam. Dengan ini, peneliti hanya perlu mentransfer atau memindah bahan yang relevan ke dalam lembaran-lembaranyang telah disiapkan dengan sebagaimana mestinya.<sup>37</sup>

Dokumentasi ialah Teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data-data. Dokumentasi dilakukan untuk menggali informasi, melihat, serta mengamati unggahan yang terdapat pada tagar #AuditKPU dan dokumen atau jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>37</sup> Faesal Sanapiah, Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial, (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), 42-43.



untuk melihat bagaimana pola komunikasi dan interaksi dari publik yang menyatakan opininya dalam tagar Twitter #AuditKPU, khususnya mencari tahu aktor yang dianggap mempunyai pengaruh penting (*key factor*) dalam pembentukan opini publik terkait kasus tersebut.

## 2. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian dilakukan dengan 4 cara yakni observasi, software *Netlytic*, wawancara, dan dokumentasi.

## 3. Analisis Data

Setelah melakukan pemrosesan data penelitian, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu analisis data. Dalam analisis data, terdapat 2 (dua) tahapan. Tahapan *pertama*, peneliti menggunakan software *Netlytic*. *Netlytic* digunakan untuk menganalisis teks dan jaringan sosial berbasis awan yang secara otomatis dapat meringkas data teks dan menemukan jaringan komunikasi dari unggahan orang-orang pada media sosial. Tahapan *kedua*, yaitu menggunakan nilai sentralitas (*Degree Centrality*, *Closeness Centrality*, dan *Betweenness centrality*). Derajat sentralitas sendiri merupakan bentuk pengukuran dari jumlah koneksi yang dimiliki untuk melihat para aktor yang berdiskusi dan menggunakan tagar #AuditKPU

## 4. Hasil

Hasil analisis kemudian digunakan untuk mendeskripsikan pembentukan opini publik terkait dugaan kasus kecurangan KPU pada

pemilu 2024 yang terdapat dalam tagar Twitter #AuditKPU sesuai dengan teori dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **F. Teknik Keabsahan Data**

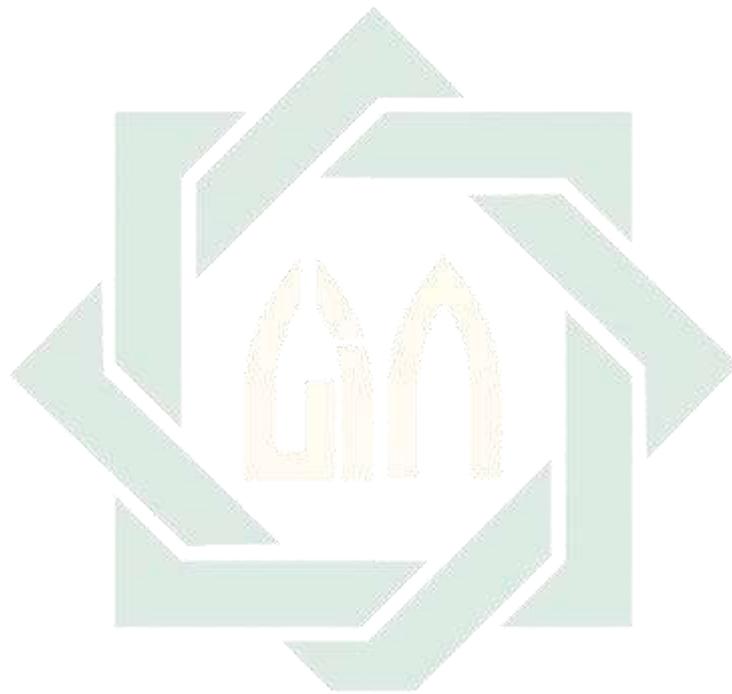
Dalam penelitian ini digunakan Teknik keabsahan data triangulasi untuk menilai penelitian dan kualitas data yang diperoleh dari *Social Network Analysis* dan wawancara guna memastikan apakah sudah tepat.

Terdapat 4 macam triangulasi menurut Denzim, diantaranya yakni sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber data, menggunakan berbagai macam sumber dengan satu metode yang sama.
- b. Triangulasi peneliti, dalam satu penelitian yang sama terdapat beberapa peneliti yang melakukan penelitian dengan disiplin ilmu yang berbeda dan harus memang ahli di dalam bidangnya masing-masing.
- c. Triangulasi teori, menggunakan beberapa macam teori untuk meneliti suatu data.
- d. Triangulasi metodologi, menggunakan beberapa macam metode dalam penelitian untuk saling melengkapi kekurangan dan kelebihan dari masing-masing metode agar bisa mendapatkan hasil yang lebih terpercaya.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi jenis triangulasi metodologi dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu metode *Social Network Analysis* dengan software *Netlytic* dan wawancara untuk melengkapi data satu sama lain. Transkrip berisi percakapan dari hasil

wawancara dengan narasumber tanpa melalui proses *editing*, sehingga tidak ada perubahan satu pun dalam data hasil.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

#### A. Penyajian Data

##### 1. Profil Tagar Twitter #AuditKPU

Tagar #AuditKPU adalah sebuah label yang menyatukan opini-opini publik di Twitter agar proses pemilu 2024 dihentikan dan KPU harus diaudit. Tagar tersebut ialah sebuah bentuk seruan aksi secara *online* yang dilakukan oleh masyarakat terkait adanya dugaan kecurangan KPU pada pemilu 2024.

Dalam tagar #AuditKPU terdapat pernyataan sikap atau opini mulai dari masyarakat hingga politikus. Tagar tersebut pertama muncul pada Desember tahun 2022 lalu dan hingga dini hari pun masih ada yang membuat unggahan (*tweet*) dengan menyertakan tagar #AuditKPU. Tagar ini telah memuat sekitar 2500 *tweets* (dari tanggal 28 Desember 2022 hingga tanggal 04 Januari 2023) yang menyita perhatian publik.

Dengan adanya gerakan tagar #AuditKPU di media sosial Twitter, bagi publik media sosial kini menjadi ruang virtual untuk menyampaikan beragam aspirasinya, termasuk kritik terhadap lembaga negara. Tagar (*hashtag*) berfungsi sebagai label yang menyatukan keseluruhan pendapat atau opini tersebut menjadi satu gerakan. Twitter masih menjadi salah satu media sosial yang sering digunakan untuk melakukan diskusi secara terbuka terkait suatu isu atau fenomena yang sedang terjadi, sehingga dapat menjadikan Twitter media penting dalam pembentukan opini publik.



1945 pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pemimpin pilihannya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E dijelaskan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.<sup>38</sup>

Pelaksanaan pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, asas pemilu meliputi:

- a. Langsung, yakni rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum, yakni seluruh warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan jelang berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi atau pengecualian.

---

<sup>38</sup> Frenki, Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyarah, Fakultas Syariah, IAIN Raden Intan Lampung, 57-58.

- c. Bebas, yakni rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- d. Rahasia, yakni rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*).
- e. Jujur, yakni dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil, yakni dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Akun @YNovensi berharap rangkaian tahapan pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pemilu yang berlaku, khususnya pada poin jujur dan adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan seperti yang terjadi dalam kasus yang ada pada tagar #AuditKPU.











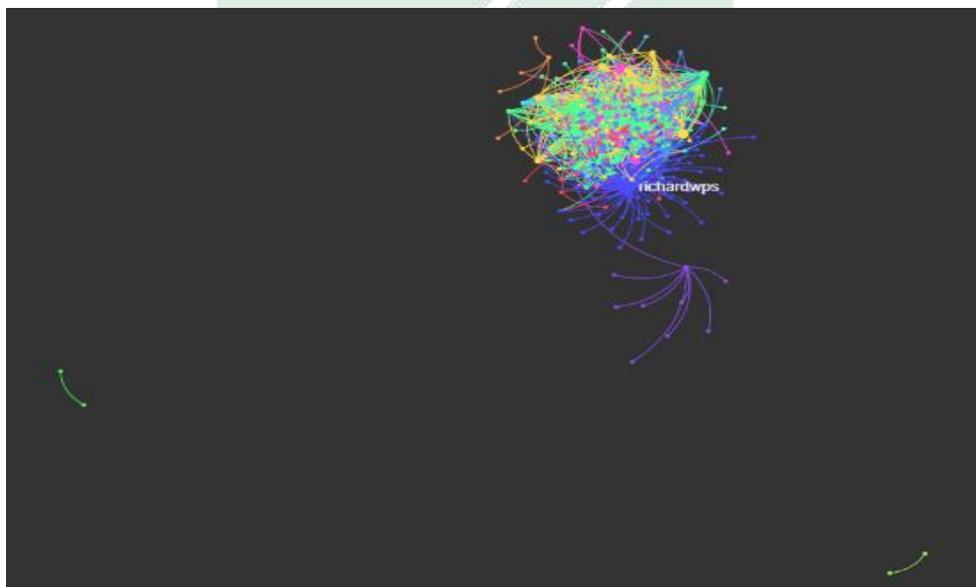




memiliki kemampuan sebagai pusat pertukaran informasi. Disamping itu, lembaga memiliki pengaruh dalam *social network* karena memiliki kemampuan untuk bertukar informasi. *Network out degree-centrality index* juga dapat dipahami sebagai akun dengan *tweet* yang paling banyak di-*retweet* oleh pengguna Twitter seperti pada gambar 4.15, akun @RichardWPS di-*retweet* oleh akun Twitter @AlifKamal\_.

Pada gambar 4.8 *top ten users (based on out degree centrality)* ditemukan bahwa @richardwps menempati tingkatan paling tinggi dengan sebanyak 114 degree (114 derajat). *Degree Centrality* dapat diartikan sebagai jumlah jaringan atau interaksi yang dimiliki suatu *node*.

#### 7. Data Visualisasi Jaringan Unggahan Tagar #AuditKPU pada Netlytic



Gambar 4.9 Visualisasi Jaringan Twitter #AuditKPU Tentang Dugaan

Kasus Kecurangan KPU pada Pemilu 2024

(Sumber: *netlytic.org*)

Setelah dilakukan analisis jaringan atau *Social Network Analysis* maka didapatkan hasil yang sesuai pada gambar 4.9, dari gambar 4.9 terlihat banyaknya *node* dan *edge*. Terdapat aktor utama dengan kepopuleran tertinggi yaitu pada akun @richardwps, serta ada beberapa *node* dan *edge* yang ikut serta dalam mendistribusikan informasi #AuditKPU.

*Netlytic* terbukti dapat memperlihatkan *node* atau aktor-aktor utama yang terkuat dalam mendistribusikan informasi pada jejaring sosial Twitter dengan tagar #AuditKPU melalui pola jaringan. Visualisasi jaringan sosial pada gambar 4.9 menunjukkan pola jaringan antara aktor dengan *tweet* yang paling banyak di-*retweet* oleh pengguna Twitter, sebagai contoh dapat dilihat pada gambar 4.15 terlihat akun Twitter @RichardWPS di-*retweet* oleh akun lain.

Visualisasi menggunakan sosiogram dengan bentuk titik-titik pada gambar disebut sebagai *node* yang merepresentasikan pengguna Twitter. *Node* dihubungkan dengan garis-garis yang disebut sebagai *edge* dan merupakan representasi dari hubungan dalam jaringan tersebut.

Berdasarkan hasil pengolahan data, terkumpul 433 *nodes* dan 1942 *edges* dalam tagar #AuditKPU, hal ini berarti bahwa terdapat 433 aktor (seseorang individu dalam jaringan), dan 1942 garis atau hubungan (penghubung antar *node*).





Nilai *density* (kepadatan) pada tagar #AuditKPU ialah 0.007591 *density*. Dengan demikian, *netlytic* menunjukkan bahwa intensitas komunikasi antar aktor pada tagar #AuditKPU rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebaran informasi berjalan lambat.

*Reciprocity* atau timbal balik menentukan tingkat mutualitas komunikasi antara aktor. Nilai *reciprocity* pada tagar #AuditKPU senilai 0.122300 *reciprocity*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat timbal balik dengan intensitas yang rendah. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak ada *followers* yang saling membalas *tweet followers* lainnya dengan tagar #AuditKPU. Nilai *reciprocity* yang tinggi menunjukkan banyaknya jumlah aktor yang melakukan percakapan timbal balik atau dua arah, sedangkan nilai *reciprocity* yang rendah menunjukkan jumlah percakapan yang sepihak dan jumlah percakapan timbal balik memiliki jumlah yang sedikit.

*Centralization* melakukan pengukuran tingkatan sentralitas rata-rata pada semua *node* pada suatu jaringan. Ketika jaringan memiliki sentralisasi tinggi (lebih mendekati angka 1) menunjukkan adanya aktor sentral yang mendominasi arus informasi, tetapi jika sentralisasi rendah (lebih mendekati angka 0) dianggap didesentralisasikan informasi lebih mengalir pada banyak aktor. Pada tagar #AuditKPU *centralization* berada pada nilai 0.162900. Dengan demikian menunjukkan bahwa nilai tersebut tergolong rendah karena lebih mendekati angka 0. Hal tersebut berarti didalam *network* Twitter tidak hanya terdiri dari 1 peserta yang menggunakan







## **B. Analisa Data**

### **1. Pembentukan Opini Publik Terkait Dugaan Kasus Kecurangan KPU dalam Tagar Twitter #AuditKPU**

Teknologi telekomunikasi dan informasi telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat diberbagai negara, termasuk Indonesia. Media sosial hadir sebagai bentuk contoh dari adanya jenis perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi. Salah satu media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia ialah Twitter.

Di Indonesia Twitter kerap kali digunakan sebagai media dalam berbagi informasi, tak terkecuali informasi politik. Kemudahan akses informasi juga yang ditawarkan juga sering digunakan untuk memulai diskusi dan menginisiasi gerakan untuk mengangkat isu-isu penting dalam kehidupan sosial politik. Salah satu isu yang sedang hangat diperbincangkan di Twitter ialah adanya dugaan kasus kecurangan KPU pada pemilu 2024 yang disampaikan melalui tagar #AuditKPU

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, tagar #AuditKPU bermula sebagai bentuk protes kepada KPU terkait adanya indikasi prosedur verifikasi partai politik calon peserta pemilu yang tidak transparan (dimanipulasi), sehingga banyak oknum yang mendesak agar tahapan pemilu 2024 dihentikan sementara dan KPU diaudit. Adanya fenomena tersebut mengakibatkan adanya partai politik atau oknum-oknum yang melakukan demotransi ke jalanan hingga demonstrasi *online* melalui media sosial Twitter dalam gerakan tagar #AuditKPU.

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori pembentukan opini publik oleh Bernard Hennessy. Hennessy (1990) dalam bukunya *Pendapat Umum*, mengemukakan adanya 5 (lima) faktor pemicu terbentuknya opini publik seperti yang telah dijelaskan pada kerangka teori, maka diperoleh data sebagai berikut:

1. Adanya Isu (*Presence of an Issue*)

Isu pada penelitian ini terfokus pada dugaan kasus kecurangan KPU pada pemilu 2024. Dugaan tersebut muncul karena adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh KPU dalam proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024, hal ini terlihat dari adanya gabungan LSM yang mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mengaku telah menyerahkan sejumlah temuan dugaan kecurangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam tahap pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024.

Sebagai contoh temuan adanya dugaan kecurangan KPU yang dialami Partai Prima yakni, ketidakpatuhan KPU di daerah-daerah dalam melaksanakan SK KPU RI Nomor 782/PL.01.1-SD/05/2022 dan SK KPU RI Nomor 1172/PL.01.1-SD/05/2022. Kedua surat tersebut pada pokoknya mengizinkan partai politik untuk menunjukkan surat keputusan pergantian kepengurusan dan surat pemecatan pengurus yang tidak aktif kepada verifikator untuk mendapatkan status memenuhi syarat. Ketidakpatuhan atau penolakan tersebut, mengakibatkan





adil dalam melakukan verifikasi faktual. Ia menyampaikan KPU bersifat intimidatif, dimana dalam unggahannya ia menjelaskan bahwa “Anggota partai Prima diancam tidak akan menerima bantuan sosial apabila mengaku sebagai anggota parta Prima dalam verifikasi faktual”, hal ini dinilai bersifat intimidatif karena terdapat tindakan menakut-nakuti atau memaksa seseorang atau pihak lain untuk berbuat sesuatu. Bahkan tidak hanya itu, akun @DediSan42886483 dalam gambar unggahannya juga menyampaikan bahwa “Pengurus partai Prima diminta mengundurkan diri dengan jaminan pasangan atau istrinya tidak dipecat dari pekerjaannya sebagai perangkat desa”.

Selanjutnya terdapat unggahan lain yang menyatakan adanya isu, unggahan ini diunggah oleh akun Twitter @soetansati me-*retweet* akun @Achmad\_Misrin80 yang mengunggah bentuk kecurangan yang dilakukan oleh KPU, dan dengan diberi *caption* atau keterangan yang menyertakan tagar #AuditKPU seperti pada gambar 4.14. Hal ini dapat diartikan bahwa akun @soetansati satu pemikiran atau setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh akun @Achmad\_Misrin80. Oleh karena itu ia mengunggah kembali unggahan akun @Achmad\_Misrin80 dan disertai *caption* atau keterangan yang dapat dilihat pada gambar 4.14.





indikasi kecurangan yang dilakukan oleh KPU, sehingga mengakibatkan partai politik tersebut tidak lolos menjadi partai politik calon peserta pemilu 2024. Hal tersebut berujung pada aksi demonstrasi secara *online* pada media sosial Twitter dengan menggunakan tagar #AuditKPU, sehingga tagar tersebut banyak menyita perhatian publik.

2. Adanya Kelompok yang Dikenal dan Berkepentingan dengan Persoalan Tersebut (*Nature of Publics*)

Kelompok disini mengacu pada partai politik yang merasa dicurangi dalam tahapan proses verifikasi calon peserta pemilu 2024 yang paling banyak disebutkan atau berinteraksi dalam tagar #AuditKPU, sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti partai politik yang dimaksud ialah Partai Prima. Pada tagar #AuditKPU banyak dijumpai akun-akun dengan *username* Prima membuat unggahan yang berkaitan dengan isu kecurangan KPU pada pemilu 2024. Akun Twitter atas nama @prima\_or\_id juga menjadi akun yang paling banyak disebut atau di-*mention* dalam unggahan pada tagar Twitter #AuditKPU, hal ini dapat dilihat pada gambar 4.7.

Berikut adalah *capture tweet* atau unggahan yang didapatkan oleh peneliti dengan mengandung unsur adanya kelompok yang dikenal atau berkepentingan dalam persoalan terkait isu kecurangan KPU pada Pemilu 2024 yang terdapat pada tagar Twitter #AuditKPU.







Adanya aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dinilai menjadikan kinerja KPU sangat tertutup. Sehingga masyarakat lain tidak dapat memantau kinerja KPU secara leluasa.

Dengan banyaknya persoalan yang terjadi dalam tubuh KPU, maka permintaan agar proses pemilu 2024 dihentikan dan KPU diaudit serta data-data partai politik dibuka kepada rakyat pun telah disuarakan seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.16.

Gambar-gambar yang telah dicantumkan diatas menunjukkan adanya kelompok yang berkepentingan, karena kebanyakan akun Twitter yang membuat unggahan dalam tagar #AuditKPU ialah dari Partai Politik PRIMA yang mana mereka merasa dicurangi oleh KPU karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai partai politik calon peserta pemilu. Sehingga mereka melakukan aksi gerakan tagar #AuditKPU untuk menyampaikan aspirasi dan kritiknya terhadap KPU.

### 3. Pilihan yang sulit (*Complex of Preferences*)

Mengacu pada totalitas opini masyarakat tentang suatu isu. Biasanya, suatu persoalan akan menjadi perbincangan umum tatkala persoalan tersebut dirasa benar-benar meresahkan dan menjadikannya sulit untuk diambil suatu pilihan.

Dalam hal ini persoalan yang dimaksud adalah isu kecurangan KPU pada pemilu 2024. Terhitung sejak 14 Juni 2022 tahapan pemilu 2024 resmi dimulai. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang

menyebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara dilakukan. Rangkaian tahapan awal proses pemilu seperti penetapan peserta pemilu 2024 telah dijalankan pada 14 Desember 2022, namun ditengah pelaksanaan tahapan tersebut dijumpai beberapa permasalahan yang menyebutkan adanya kecurangan KPU pada pemilu 2024 sehingga menyebabkan permintaan untuk dilakukannya penundaan pemilu hingga pada dihentikannya proses pemilu 2024.

Adanya kasus kecurangan KPU pada pemilu 2024 dinilai meresahkan karena dapat mencedarai demokrasi dan kurangnya penegakkan keadilan pada pemilu 2024. KPU sebagai badan pemerintahan negara yang menyelenggarakan pemilu memiliki tanggung jawab penuh dalam mengawasi setiap tahapan pemilu, mulai dari persiapan dan pelaksanaan pemilu, hingga pada proses perhitungan surat suara dan penentuan pemenang pemilu. Selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu di setiap tahapannya, KPU juga harus menyelenggarakan pemilu secara aman dan damai. Oleh sebab itu, KPU diharuskan untuk bekerja secara independen dan transparan.

Pada kasus ini KPU dianggap tidak transparan serta tidak jujur dan adil dalam melakukan tahapan proses pemilu 2024. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.19 yang memuat unggahan akun Twitter @RichardWPS dengan gambar yang berisikan “Ada 4 dugaan kenapa harus audit KPU, yang (1) manipulatif, (2) jauh dari transparan, (3) pesanan oligarki, dan



Berdasarkan data diatas, maka adanya fenomena dugaan kasus kecurangan KPU dalam tagar Twitter #AuditKPU menimbulkan adanya pilihan yang sulit disaat masyarakat tengah menyambut pemilu 2024. Pilihan tersebut berupa permintaan penundaan pemilu 2024 atau dihentikannya proses pemilu 2024 hingga pada KPU yang harus diaudit. Jika penundaan pemilu terjadi maka dapat berdampak adanya inkonstitusional yang merupakan bentuk pengkhianatan konstitusi dan dapat menghapus semangat reformasi yang dituangkan dalam amandemen UUD 1945. Adanya penundaan pemilu juga menunjukkan bahwa negara tidak patuh pada hukum yang ada, penundaan pemilu akan mengakibatkan kemunduran dan menimbulkan pertanyaan keabsahan demokrasi.

#### 4. Suatu Pernyataan/Opini (*Expression of Opinion*)

Berbagai pernyataan berkumpul pada isu dugaan kasus kecurangan KPU pada pemilu 2024. Peneliti mendapatkan beberapa *capture tweet* atau unggahan para pengguna Twitter yang menyertakan tagar #AuditKPU dalam unggahannya.

Mereka menyatakan opininya dalam berbagai cara. Jika dilihat dari jenis pesan yang disampaikan para pengguna pun beragam, ada yang berupa tulisan dan ada pula yang berupa gambar. Oleh karena itu, penulis menyajikan poin-poin sebagai berikut:





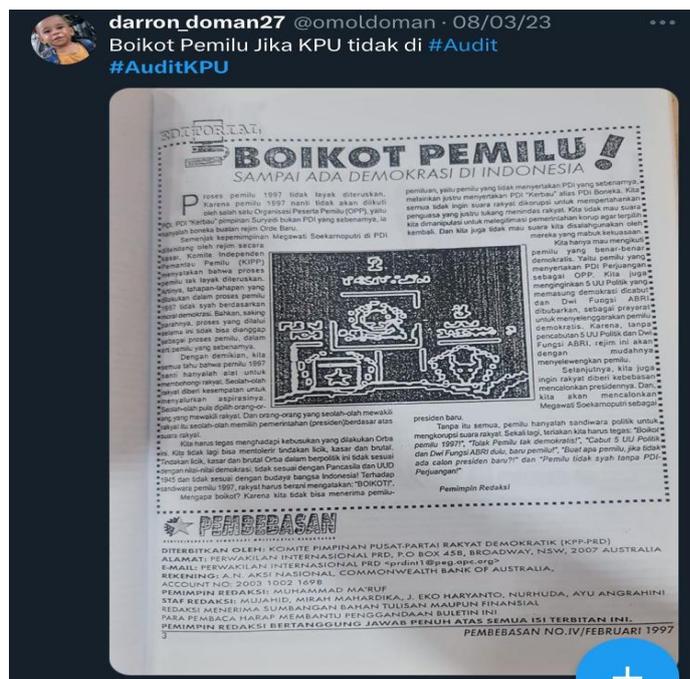






3) Koersif

Isi pesan yang ditulis pada kicauan memiliki unsur perintah atau instruksi.



Gambar 4.26 Unggahan Berupa Koersif pada Tagar #AuditKPU

(Sumber: Akun Twitter @omoldomon)

Pada gambar 4.26 dapat dilihat unggahan Twitter oleh akun @omoldomon yang berupa koersif. Dalam unggahan tersebut terdapat gambar yang disertai dengan keterangan atau *caption* “Boikot Pemilu Jika KPU tidak di #AuditKPU”, kata tersebut menggambarkan unggahan yang bersifat koersif karena adanya paksaan untuk boikot pemilu jika KPU tidak diaudit.







unggahannya “Demokrasi sedang tidak baik-baik, perbuatan melawan hukum oleh @KPU\_ID harus diusut agar demokrasi kita tegak adil, jujur, dan demokratis.”, unggahan tersebut pun disertai dengan tagar #AuditKPU.

## 2) Kontra



Gambar 4.30 Unggahan Kontra pada Tagar Twitter #AuditKPU

(Sumber: Akun Twitter @faridachusna1)

Akun Twitter @faridachusna1 menyampaikan pendapat atau opininya terkait dugaan kasus kecurangan KPU melalui unggahannya yang dapat dilihat pada gambar 4.30. Dalam unggahannya ia terlihat *me-retweet* atau mengunggah ulang unggahan akun @tempo.co dengan memberikan *caption* atau keterangan “Apakah sudah benar, karena kecurangan terhadap Partai PRIMA, KPU sudah harus segera diaudit”, keterangan tersebut terlihat seperti ia meragukan jika KPU harus diaudit hanya



unggahannya tersebut tidak terlihat mendukung adanya audit KPU, penundaan pemilu, ataupun transparansi data KPU, akan tetapi ia bersifat netral karena pada kata-kata “pemilu ditunda” merupakan kata-kata yang memiliki definisi formal atau tidak mengandung unsur apapun dan bukan termasuk penolakan, pembantahan, atau persetujuan.

Berdasarkan data di atas, masyarakat menyampaikan pendapat atau opininya terkait dugaan kasus kecurangan KPU dalam tagar Twitter #AuditKPU dengan berbagai cara. Opini masyarakat timbul karena adanya isu yang menyita perhatian, sehingga dapat memulai diskusi ataupun berdiskusi terkait fenomena atau isu tersebut melalui Twitter khususnya pada tagar #AuditKPU.

#### 5. Jumlah Orang yang Terlibat (*Number of Persons Involved*)

Opini publik merupakan besarnya masyarakat yang menaruh perhatian terhadap suatu isu. Dari akumulasi data yang diperoleh peneliti tagar #AuditKPU telah memuat lebih dari 2500 *tweet* atau unggahan hingga saat ini. Hal tersebut menggambarkan jika tagar tersebut telah ramai dipergunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau opininya yang berkaitan dengan isu kecurangan KPU pada pemilu 2024.

Sesuai hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, pengguna media sosial menempati peringkat ke-5 pengguna Twitter terbanyak di dunia. Ada sekitar 18,45 juta pengguna Twitter di tanah air per Januari 2022

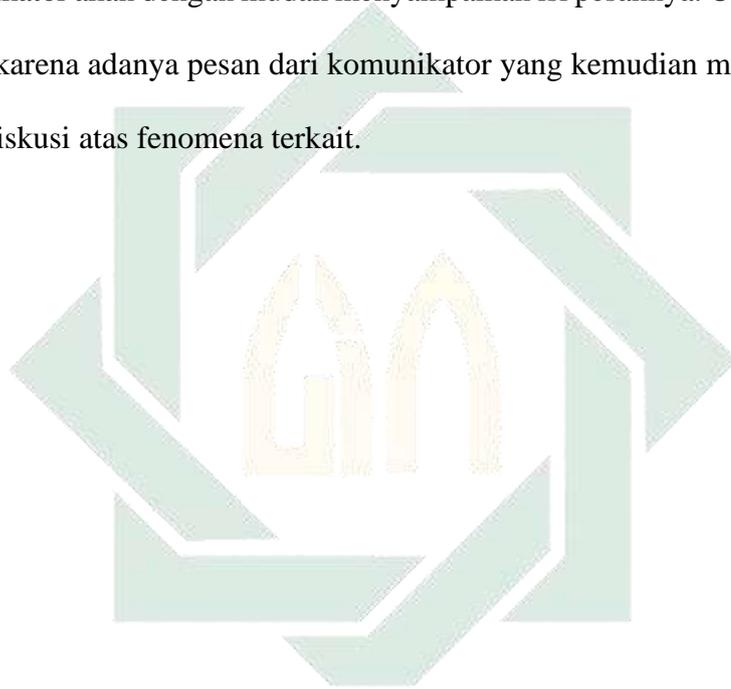
lalu dari total 830 juta pengguna global. Kemudahan yang ditawarkan Twitter menjadikan media ini sering dipakai oleh para penggunanya untuk membahas topik tertentu sehingga menjadi *trending topic* atau topik yang sedang menarik perhatian banyak pengguna Twitter. Hal inilah yang kemudian dapat mempercepat pembentukan opini publik tentang suatu masalah atau isu yang dibahas dan sedang hangat diperbincangkan. Seperti yang terjadi pada kasus dugaan kecurangan KPU pada pemilu 2024.

Selain melakukan analisa dengan menggunakan teori pembentukan opini publik oleh Bernard Hennessy, peneliti juga melakukan wawancara kepada pakar politik bapak Dr. H. Moh Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si terkait pembentukan opini publik di media sosial khususnya Twitter. Berikut cuplikan wawancara yang dilakukan:

“Semua aktor politik, baik partai politik, politisi maupun para tim sukses serta konsultan politik dari para aktor politik tersebut akan menjadikan media sosial sebagai instrumen komunikasi politiknya, karena selain tingkat penggunaan media sosial di Indonesia sangat tinggi juga karena penggunaan media sosial dianggap lebih efektif dan murah dibandingkan media massa, seperti media elektronik dan media cetak. Salah satu platform media sosial yang cukup populer dan tinggi penggunaannya adalah Twitter, apalagi dalam konteks pembahasan konstelasi politik. Beberapa tokoh publik dan politisi mempergunakan platform media ini karena dianggap efektif membangun narasi politik. Kata dan kalimat yang disusun bisa lebih banyak volumenya dibandingkan Instagram, dan lebih bebas terjadi dialog dibanding Facebook misalnya. Maka, menurut saya, Twitter dapat berkontribusi pada pembentukan opini publik”. (Dr. H. Moh Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si, 13 Juli 2023).

Menurut penjelasan informan, dapat diketahui bahwa media sosial memiliki kontribusi terhadap pembentukan opini publik di media sosial,

termasuk Twitter. Media sosial menjadi media yang dapat menyampaikan suatu pesan dalam berkomunikasi, Antara media sosial dan opini publik dapat berjalan beriringan karena dengan adanya media sosial tersebut maka komunikator akan dengan mudah menyampaikan isi pesannya. Opini publik terjadi karena adanya pesan dari komunikator yang kemudian menciptakan suatu diskusi atas fenomena terkait.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pembentukan opini publik pada tagar Twitter #AuditKPU terjadi karena telah memenuhi faktor-faktor pembentukan opini publik seperti yang disampaikan oleh Bernard Hennessy (1990), yakni; (1) adanya isu (*presence of an issue*), dimana isu yang terdapat dalam penelitian ini ialah adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh KPU saat verifikasi data partai politik calon peserta pemilu 2024 yang disuarakan oleh partai politik Prima. (2) adanya kelompok yang berkepentingan (*nature of publics*), sesuai dengan observasi dan data yang diperoleh peneliti, maka yang dimaksud sebagai kelompok yang berkepentingan ialah partai politik Prima. (3) adanya pilihan yang sulit (*complex of preferences*), pilihan ini berupa permintaan penundaan pemilu 2024 atau dihentikannya proses pemilu 2024 hingga pada KPU yang harus diaudit. (4) adanya suatu pernyataan/opini (*expression of opinion*), masyarakat menyampaikan opini atau pendapatnya terkait dugaan kasus kecurangan KPU pada tagar #AuditKPU melalui berbagai cara penyampaian, dapat berupa gambar, tulisan, saran, kritik, dan lain sebagainya. Dan (5) yang terakhir jumlah orang yang terlibat (*number of persons involved*).

Media sosial merupakan ruang terbuka bagi publik, segala hal mencakup informasi yang tersaji maka dapat menjadi konsumsi publik dan menimbulkan berbagai tanggapan, kritik, dan opini dari berbagai sudut pandang. Dengan adanya gerakan tagar #Audit KPU di media sosial Twitter, bagi publik media

sosial kini menjadi ruang virtual untuk menyampaikan beragam aspirasinya, termasuk kritik terhadap lembaga negara. Tagar (*hashtag*) berfungsi sebagai label yang menyatukan keseluruhan pendapat atau opini tersebut menjadi satu gerakan. Twitter masih menjadi salah satu media sosial yang sering digunakan untuk melakukan diskusi secara terbuka terkait suatu isu atau fenomena yang sedang terjadi, sehingga dapat menjadikan Twitter media penting dalam pembentukan opini publik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti mengajukan beberapa saran kepada pihak terkait dengan penelitian ini yakni kepada KPU, diharapkan dengan adanya protes atau gerakan digital masyarakat melalui tagar #AuditKPU di Twitter atas adanya isu kecurangan yang dilakukan KPU pada pemilu 2024, maka hal ini dapat dijadikan pembelajaran bagi KPU untuk lebih bekerja secara independen dan transparan serta jujur dan adil sehingga tidak terdapat lagi isu kecurangan yang dilakukan KPU pada proses pemilu. Kemudian saran bagi penelitian selanjutnya, yakni karena banyak data yang digunakan dan keterbatasan *Netlytic* dalam mengambil data penelitian secara *online* membuat penelitian ini kurang maksimal dalam hal perhitungan sehingga untuk kedepannya peneliti lain diharapkan dapat lebih mengeksplorasi berbagai software yang dapat digunakan untuk meneliti *Social Network Analysis* untuk mengelola data dalam jumlah besar.







- Mollita et al. 2020. *Strategi Pemerintah Indonesia dalam Membentuk Opini Publik Terkait Pemberlakuan PSBB*. *Jurnal Syntax Transformation* 1, no 9 (2022).
- Muhamad Ibnu Adam. *Analisis Pola Jaringan Sosial Terhadap Pengaruh Structural Holes Spanner dalam Percakapan di Twitter (Studi Social Network Analysis pada Kasus PON XX Papua 2021)*.
- Puji Rianto. *Opini Publik, Agenda Setting, dan Kebijakan Publik*. *Jurnal Komunikasi* 5, no 1 (2010).
- Qadri, Muhammad. *Pengaruh Media Sosial dalam Membangun Opini Publik*. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no 1 (2020).
- Raja et al. *Opini Publik di Media Sosial Instagram #2019GANTIPRESIDEN Vs #2019TETAPJOKOWI*. *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no 3 (2020).
- Solihah. *Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018).
- Syailendra et al. *Penggunaan Sosial Media Twitter dalam Komunikasi Organisasi (Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Penanganan Covid-19)*. *Journal Of Islamic and Law Studies* 4, no 2 (2020).
- Tika et al. *Analisis Sentimen Opini Publik Mengenai Larangan Mudik pada Twitter Menggunakan Naïve Bayes*. *Jurnal CoreIT* 6, no 2 (2020).
- Yesi Monika Manik, Heri Sutanta, Diyono. *Analisis Pemangku Kepentingan dan Perannya dalam Pemanfaatan Informasi Geospasial di Pemerintah Daerah Menggunakan Metode Social Network Analysis*.

Seminar Nasional Geomatika 2017: Inovasi Teknologi Penyediaan Informasi Geospasial untuk Pembangunan Berkelanjutan. Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

### Website

Andry Novelino, Yusril. *Verifikasi Parpol dan Dugaan Kecurangan KPU di Pemilu 2024*. Diakses pada tanggal Jumat 17 Maret 2023 pukul 00.59 WIB. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230113100052-32-899888/yusril-verifikasi-parpol-dan-dugaan-kecurangan-kpu-di-pemilu-2024>.

Annur, Cindy Mutia. *Jumlah Pengguna Twitter Terbanyak di Dunia (Per Januari 2022)*. Diakses pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 21.35 WIB <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/pengguna-twitter-indonesia-masuk-daftar-terbanyak-di-dunia-urutan-berapa>.

Christvidya, Kezia Prasetya. *Pengertian Buzzer dan Cara Kerjanya di Media Sosial*. Diakses pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 23.54 WIB. <https://www.fimela.com/lifestyle/read/4513410/pengertian-buzzer-dan-cara-kerjanya-di-media-sosial>.

Jurnal Entrepreneur. *Pengertian Audit*. Diakses pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 04.07 WIB. <https://www.jurnal.id/id/blog/2018-mengenal-audit-laporan-keuangan-dari-pengertian-tujuan-dan-tahapan-nya/>.

KumparanNEWS. *KPU Tanggapi Tuntutan Partai Prima dan Partai Republikku soal Audit*. diakses pada 6 januari 2023 pukul 21.28 WIB.

[https://kumparan.com/kumparannews/kpu-tanggapi-tuntutan-partai-prima-dan-partai-republikku-soal-audit-1zOtWsqKSzP\\_](https://kumparan.com/kumparannews/kpu-tanggapi-tuntutan-partai-prima-dan-partai-republikku-soal-audit-1zOtWsqKSzP_)

<https://Anatoliygruzd.com/> diakses pada 13 Januari 2023 pukul 02.28 WIB.

Zaenuddin. *Bagaimana Twitter Memengaruhi Opini Publik dan Preferensi*

*Politik*. diakses pada 5 Maret 2023 pukul 19.46 WIB.

<https://tirto.id/bagaimana-twitter-memengaruhi-opini-publik-dan-preferensi-politik-cGre>.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A